



**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN ASLI
DAERAH TAHUN 2019-2021
(STUDI EMPIRIS BAPENDA KABUPATEN SUKABUMI)**

SKRIPSI

Dibuat Oleh:

Vitto Pratama Putra
022119010

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

**JANUARI
2024**

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI EMPIRIS
BAPENDA KABUPATEN SUKABUMI) TAHUN 2019-2021**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pakuan

Mengetahui



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Towaf Totok Irawan, SE, ME, Ph.D)

Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA, CSSA, CA,
CESP, QIA, CFE, CGCAE)

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'Arief'.

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI EMPIRIS
BAPENDA KABUPATEN SUKABUMI) TAHUN 2019-2021**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari : Rabu, 7 Februari 2024

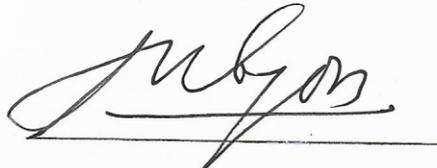
Vitto Pratama Putra
022119010

Dosen Penguji Sidang
(Ketut Sunarta, Ak., M.M., CA., PIA.)

Disetujui,



Ketua Komisi Pembimbing
(Satsangkaryon, Drs., Ak., M.M.)

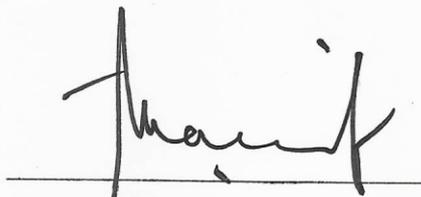


Anggota Komisi Pembimbing
(Sigit Edy, Drs., Ak., M.M.)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA,
CSSA, CA, CESP, QIA, CFE, CGCAE)

Diketahui,



Pernyataan Pelimpahan Hak Cipta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vitto Pratama Putra

NPM : 022119010

Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris BAPENDA Kabupaten Sukabumi) Tahun 2019-2021

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, desember 2024



Vitto Pratama Putra
022119010

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2023
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan atau memperbanyak Sebagian atau seluruh karya ilmiah dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

VITTO PRATAMA PUTRA. 022119010. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris BAPENDA Kabupaten Sukabumi) Tahun 2019-2021. Di bawah bimbingan : SATSANGKARYON dan SIGIT EDY SURONO 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah. Namun, muncul permasalahan terkait hilangnya potensi pendapatan pajak daerah yang menyebabkan turunnya penerimaan pajak daerah sehingga berdampak pada PAD.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menguji apakah indikator lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2021. (2) Untuk menguji apakah indikator penilaian risiko berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2021. (3) Untuk menguji apakah indikator kegiatan pengendalian berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2021. (4) Untuk menguji apakah indikator informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2021. (5) Untuk menguji apakah indikator pemantauan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2021. (6) Untuk menguji apakah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan (sistem pengendalian intern pemerintah) berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2021.

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi. Populasi pada penelitian ini yaitu pegawai Badan Pendapatan Asli Daerah. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 65 responden dari Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi yang berstatus ASN. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi berganda dan uji hipotesis. Data diuji menggunakan *software* SPSS versi 25.

Pengujian secara parsial dengan uji t pada indikator lingkungan pengendalian tidak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah memiliki nilai $t_{hitung} 1,739 < t_{tabel} 2,000$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,087 > 0,05$. Pada indikator penilaian risiko tidak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah memiliki $t_{hitung} 1,381 < t_{tabel} 2,000$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,173 > 0,05$. Pada indikator kegiatan pengendalian tidak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah memiliki nilai $t_{hitung} -1,425 < t_{tabel} 2,000$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,152 > 0,05$. Pada indikator informasi&komunikasi tidak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah memiliki nilai $t_{hitung} 0,044 < t_{tabel} 2,000$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,965 > 0,05$. Pada indikator pemantauan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan asli daerah memiliki nilai $t_{hitung} 7,925 > t_{tabel} 2,000$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Sedangkan untuk pengujian secara simultan dengan uji F pada indikator lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi&komunikasi dan pemantauan (sistem pengendalian intern pemerintah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan asli daerah memiliki nilai $F_{hitung} 45,728 > F_{tabel} 2,76$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.

Kata Kunci: sistem pengendalian intern, pemerintah, dan pendapatan asli daerah

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberi rahmat, kesehatan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Bapenda Kabupaten Sukabumi) Tahun 2019-2021”.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor. Terwujudnya skripsi ini penulis berkesempatan untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang turut membantu dan mendorong penulis dalam usaha menyelesaikan proposal penelitian ini :

1. Allah SWT. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
2. Superhero dan panutanku, Ayahanda Ece. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi harus ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
3. Pintu surgaku, Ibunda Herti Rusmiati. Beliau juga sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai dibangku perkuliahan, tapi semangat, motivasi do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi harus ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
4. Untuk adikku, Raicha Dwi Putri. Terimakasih sudah menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan studinya dan alasan penulis untuk pulang kerumah setelah meninggalkan rumah demi menempuh pendidikan di bangku perkuliahan
5. Bapak Towaf Totok Irawan, SE, ME, Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
6. Bapak Satsangkaryon, Drs., Ak., M.M selaku ketua komisi pembimbing yang telah memberikan saran dan masukan selama bimbingan.
7. Bapak Sigit Edi, Drs., Ak.,M.M. selaku anggota komisi pembimbing yang telah memberikan arahan dan semangat selama bimbingan.
8. Ibu Dr. Siti Maimunah, S.E., M.Si., CPSP.,CPMP.,CAP. Selaku penguji seminar proposal yang telah memberikan saran dan masukan

9. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, AK., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
10. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E, M.Si., CMA., CAPM. Selaku Wakil Dekan I Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
11. Ibu Enok Rusmanah, S.E., M.Acc. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
12. Dosen-dosen Strata 1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah memberikan banyak ilmu.
13. Ibu Miranti Suci Puspitasari, S.Sos.,MM selaku Kepala Subkor Perencanaan dan Evaluasi Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi yang telah membantu dalam proses riset data tugas akhir
14. Untuk Alda Lutfiah Putri, S.Pd selaku kekasih, terimakasih atas segala hal yang diberikan dalam bentuk do'a, dukungan, dan semangat dalam penyusunan skripsi, besar harapan sukses dan hidup bersama.
15. Teman-teman yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan doa agar menyelesaikan proposal ini dengan baik.
16. Teman-teman kelas A akuntansi Angkatan 2019 yang selama ini selalu ada dalam susah dan senang.
17. Teman-teman Danu, Fiqri, Rahman, Angga, Hanni, Cindy, Rezkhy yang selama ini menjadi teman yang selalu membagi tawa dan duka sekaligus menjadi teman dekat
18. Teman seperbimbingan yang telah banyak membantu dalam penyusunan proposal ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun sehubungan dengan kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Bogor, Januari 2024
Penulis

Vitto Pratama Putra

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN	iii
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	4
1.2.1 Identifikasi Masalah	4
1.2.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Maksud Penelitian	4
1.3.2 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	6
2.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	6
2.1.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	6
2.1.3 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	6
2.2 Pendapatan Asli Daerah	8
2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	8
2.2.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah	9
2.3 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran	11
2.3.1 Penelitian Sebelumnya	11
2.3.2 Kerangka Pemikiran	18
2.3.2.1 Pengaruh Lingkungan Pengendalian terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah	18
2.3.2.2 Penilaian Risiko	19
2.3.2.3 Pengaruh Kegiatan Pengendalian terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah	19

2.3.2.4 Pengaruh Informasi dan Komunikasi terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah	19
2.3.2.5 Pengaruh Pemantauan terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah	20
2.3.2.6 Pengaruh Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, Pemantauan (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)	20
2.4 Hipotesis Penelitian.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian.....	24
3.2.1 Objek Penelitian.....	24
3.2.2 Unit Analisis	24
3.2.3 Lokasi Penelitian.....	24
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	25
3.3.1 Jenis Data Penelitian	25
3.3.2 Sumber Data Penelitian.....	25
3.4 Operasional Variabel.....	25
3.5 Metode Penarikan Sampel.....	28
3.6 Metode Pengumpulan Data	28
3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data.....	29
3.7.1 Statistik Deskriptif	29
3.7.2 Uji Kualitas Data.....	29
3.7.2.1 Uji Validitas	29
3.7.2.2 Uji Reliabilitas.....	30
3.7.3 Uji Asumsi Klasik.....	30
3.7.3.1 Uji Normalitas	30
3.7.3.2 Uji Multikolinearitas.....	31
3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas	31
3.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	31
3.7.5 Uji Hipotesis	32
3.7.5.1 Uji t	32
3.7.5.2 Uji F	33
3.7.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)	33
BAB IV HASIL PENELITIAN	34
4.1 Hasil Pengumpulan Data.....	34
4.1.1 Deskripsi Karakteristik Responden.....	34
4.1.2 Deskripsi Data Variabel	36

4.2 Metode Pengolaan Data/Analisis Data	40
4.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif	40
4.2.2 Hasil Uji Kualitas Data	42
4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	45
4.2.4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	50
4.2.5 Hasil Uji Hipotesis	51
4.3 Pembahasan.....	54
4.3.1 Interpretasi Hasil Penelitian	64
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	67
5.1 Simpulan	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71
LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi (Dalam ribuan rupiah) 2019-2021	2
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya.....	11
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	25
Tabel 3.2 Daftar Responden.....	28
Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	34
Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan.....	35
Tabel 4.4 Deskripsi Responden PNS Bapenda Berdasarkan Golongan.....	35
Tabel 4.5 Penilaian Responden Indikator Lingkungan Pengendalian (X1).....	36
Tabel 4.6 Penilaian Responden Indikator Penilaian Resiko (X2).....	37
Tabel 4.7 Penilaian Responden Indikator Kegiatan Pengendalian (X3).....	38
Tabel 4.8 Penilaian Responden Indikator Informasi dan Komunikasi (X4).....	38
Tabel 4.9 Penilaian Responden Indikator Pemantauan (X5).....	39
Tabel 4.10 Penilaian Responden Variabel Tingkat Pendapatan Asli Daerah (Y).....	39
Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	40
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah indikator Lingkungan Pengendalian (X1).....	42
Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah indikator Penilaian Risiko (X2).....	43
Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah indikator Kegiatan Pengendalian (X3).....	43
Tabel 4.15 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah indikator Informasi dan Komunikasi (X4).....	44
Tabel 4.16 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah indikator Pemantauan (X5).....	44
Tabel 4.17 Hasil Uji Validitas Tingkat Pendapatan Asli Daerah (Y).....	44
Tabel 4.18 Hasil Uji Realibilitas.....	45
Tabel 4.19 Hasil Uji Normalitas.....	45
Tabel 4.20 Hasil Uji Multikolinearitas.....	47
Tabel 4.21 Hasil Uji Heterokedstisitas.....	48
Tabel 4.22 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	50
Tabel 4.23 Hasil Uji Parsial (Uji t).....	52
Tabel 4.24 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	53
Tabel 4.25 Hasil Koefisien Determinasi (R^2).....	53
Tabel 4.26 Target dan Realisasi Rincian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi (Dalam ribuan rupiah) 2019-2021.....	55
Tabel 4.29 Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan tahun 2019-2021.....	58
Tabel 4.30 Matriks Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	21
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas.....	46
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Surat Perizinan.....	72
Lampiran II: Kuesioner Penelitian.....	76
Lampiran III: Tabel.....	79
Lampiran IV Dokumentasi.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seringkali dikemukakan bahwa ujian yang sebenarnya untuk manajemen yang baik ialah kemampuan mengorganisasi dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam mencapai dan memelihara suatu tingkat operasi yang efektif, karena pada akhirnya keberhasilan kepemimpinan dan organisasi diukur dengan konsep efektivitas. Semakin berkembangnya suatu organisasi ataupun instansi yang diikuti dengan semakin kompleks dan luasnya aktivitas serta permasalahan yang nantinya akan dihadapi oleh suatu organisasi ataupun instansi sehingga mendorong suatu organisasi ataupun instansi itu untuk membentuk sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara terus menerus secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap empat hal, yaitu: Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara, Keandalan pelaporan keuangan. Keamanan asset Negara, Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk menciptakan pemerataan pembangunan diseluruh daerah, pemerintah pusat mengeluarkan peraturan mengenai otonomi daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yaitu, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah diyakini merupakan cara terbaik untuk mendorong pembangunan daerah dalam menggantikan sistem pembangunan terpusat yang dinilai kurang bisa mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan masing- masing daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa: Pendapatan Daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah bersumber dari penerimaan dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah dan pendapatan daerah itu sendiri berupa Pendapatan

Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan dan menyediakan pelayanan publik, pemerintah memiliki wewenang yang luas dalam merencanakan dan mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh untuk menyelenggarakan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri terbagi menjadi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi adalah Instansi Kabupaten Sukabumi yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 78 Tahun 2016 BAPENDA yaitu Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah selain PBB dan BPHTB ; Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB ; Bagi Hasil dan PAD bukan Pajak. Berikut perkembangan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sukabumi dalam 3 tahun terakhir (2019-2022).

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi
(Dalam ribuan rupiah)
2019-2021

Tahun	Uraian	Target	Realisasi	%
2019	Pendapatan Asli Daerah	598.844.771.544	619.788.612.705	103,49%
2020	Pendapatan Asli Daerah	624.253.231.412	660.864.220.832	105,86%
2021	Pendapatan Asli Daerah	651.923.206.231	676.557.376.024	103,78%

Sumber: Bapenda

Pada tabel 1.1 di atas mengenai realisasi pendapatan asli daerah kabupaten sukabumi tahun 2019-2021, pada tahun 2019 realisasi pendapatan mencapai Rp.619.788.612.705, pada tahun 2020 realisasi pendapatan asli daerah mencapai Rp.660.864.220.832 dan pada tahun 2021 realisasi pendapatan asli daerah mencapai Rp.676.557.376.024 dalam hal ini untuk tingkat pendapatan asli daerah tahun 2019-2021 setiap tahun nya mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2019 ke 2020 peningkatan yang terjadi mencapai Rp.41.075.608.127 sedangkan dari tahun 2020 ke 2021 peningkatan yang terjadi mencapai Rp.15.693.155.192.

Menurut informasi (Redaksi.Sukabumiekspres, 2022), sebanyak 108 hotel dan restoran di Kabupaten Sukabumi dikategorikan tak berizin bahkan ada yang mengalami kebangkrutan. Kondisi tersebut membuat Pemkab Sukabumi kehilangan pendapatan potensi pajak daerah untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sukabumi, Dadang, mengatakan jumlah tersebut berdasarkan hasil pendataan selama 2021. Sampai saat ini pun proses pendataan masih dilakukan.

Bapenda dipastikan dapat melakukan tindakan jika hotel dan restoran ilegal berada di wilayah perkotaan. Namun kasusnya berbeda apabila bangunannya berada di area sempadan pantai. Bapenda telah berkoordinasi dengan DPMPTSP menyangkut perizinan. Termasuk dengan Dinas Pariwisata menyangkut operasional hotel dan restoran maupun tempat hiburan.

Selain itu berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2021 selalu ada rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi. Rekomendasi tersebut mempersoalkan tentang Perencanaan kerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dan Pencapaian Kinerja.

Pada tahun 2019-2021 terdapat sebuah perubahan atas catatan perbaikan akan tetapi masih catatan rekomendasi yang belum diperbaiki yaitu Membuat pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas yang telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward&punishment*, hasil evaluasi internal ditindaklanjuti, dimanfaatkan dan dijadikan bahan untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja. Berdasarkan permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi belum bisa dikatakan sepenuhnya baik dikarenakan masih banyak rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan terkait kinerja yang dilakukan. Tidak hanya itu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi belum mampu untuk menggali potensi pajak restoran dan hotel yang ada. Banyak sekali potensi pajak restoran dan hotel yang belum terealisasi dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah, yang menyebabkan penerimaan tidak dimanfaatkan maksimal sehingga pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah menjadi terhambat akibat dari penerimaan yang tidak optimal. Di sisi lain tingkat pendapatan asli daerah dari tahun 2019-2021 mengalami peningkatan hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya evaluasi yang diberikan oleh inspektorat kabupaten sukabum terhadap badan pendapatan asli daerah kabupaten sukabumi berdasarkan laporan evaluasi tersebut sehingga adanya perubahan dari tahun ke tahun dan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan tingkat pendapatan asli daerah.

Salah satu unsur yang tidak memenuhi sistem pengendalian intern pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada pelaksanaan lingkungan pengendalian yang memiliki kelemahan salah satunya masih terdapat catatan kekurangan untuk perbaikan dalam kinerja yang dilakukan dan juga masih terdapat potensi pajak hotel dan restoran yang masih belum bisa dimanfaatkan sebagai tambahan untuk pendapata asli daerah. Maka, beberapa upaya harus dilakukan untuk meningkatkan sistem pengendalian intern pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi. Upaya tersebut diantaranya adalah peningkatan sistem pengawasan dan aktivitas pengendalian. Oleh karena itu penelitian ini tertarik dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah (studi empiris BAPENDA Kabupaten Sukabumi) Tahun 2019-2021”**

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang muncul berdasarkan latar belakang karena adanya rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan terkait kinerja yang dilakukan dan belum mampu memanfaatkan potensi pajak restoran dan hotel yang belum terealisasikan yang menyebabkan penerimaan berkurang sehingga target penerimaan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah menjadi tidak optimal. Hal ini dikarenakan sistem pengendalian intern pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi tidak maksimal.

1.2.2 Perumusan Masalah

1. Apakah indikator Lingkungan Pengendalian berpengaruh terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2021?
2. Apakah indikator Penilaian Risiko berpengaruh terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2021?
3. Apakah indikator Kegiatan Pengendalian berpengaruh terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2021?
4. Apakah indikator Informasi dan Komunikasi Tingkat Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2021?
5. Apakah indikator Pemantauan Tingkat Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2021?
6. Apakah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2021 ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud saya melakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi yaitu membuat kesimpulan mengenai pengaruh variabel independen yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap variabel dependen Tingkat Pendapatan Asli Daerah. Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman serta memperoleh data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan identifikasi masalah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mencari bukti empiris dengan menguji pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap tingkat pendapatan asli daerah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk menguji apakah indikator lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2021.
2. Untuk menguji apakah indikator penilaian risiko berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2021.
3. Untuk menguji apakah indikator kegiatan pengendalian berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2021.
4. Untuk menguji apakah indikator informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2021.
5. Untuk menguji apakah indikator pemantauan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2021.
6. Untuk menguji apakah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan (sistem pengendalian intern pemerintah) berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan wawasan mengenai sistem pengendalian internal dan pendapatan asli daerah di pemerintahan dan memahami perbandingan antara konsep yang diberikan pada masa perkuliahan dengan penerapannya langsung di instansi pemerintah.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pemahaman, pengembangan, ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Akuntansi Sektor Publik.

3. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran untuk meningkatkan sistem pengendalian internal agar dapat menjalankan kinerja dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revui, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

2.1.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Unsur Sistem Pengendalian Intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan atau tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan system pengendalian intern. Pengembangan sistem pengendalian intern perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 bahwa unsur pengendalian intern, meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menggambarkan keseluruhan sikap organisasi yang mempengaruhi kesadaran dan Tindakan personel organisasi mengenai pengendalian. Dengan kata lain, Lingkungan pengendalian merupakan pondasi dasar yang mendasari suatu sistem pengendalian internal pemerintah. Apabila lingkungan pengendalian menunjukkan kondisi yang baik, maka dapat memberi pengaruh yang cukup baik bagi suatu organisasi, namun sebaliknya apabila lingkungan pengendalian jelek, mengindikasikan bahwa organisasi tersebut tidak sehat. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara

lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Melalui proses penilaian resiko ini, maka setiap entitas dapat mengantisipasi setiap kejadian yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Berdasarkan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pimpinan Instansi wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri atas:

1) Identifikasi risiko

Identifikasi risiko dilaksanakan dengan:

- a. Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif.
- b. Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal.
- c. Menilai faktor lain yang meningkatkan risiko.

2) Analisis risiko

Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Pimpinan instansi pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang diterima.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun dengan maksud untuk memastikan pelaksanaan petunjuk yang dibuat oleh manajemen, merespon risiko yang dimiliki instansi pemerintah dan memastikan bahwa respon tersebut efektif, Kegiatan pengendalian tersebut membantu memastikan bahwa tindakan mengatasi dan menanggulangi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian terdiri dari:

- a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
- b. Pembinaan sumber daya manusia
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- d. Pengendalian fisik atas asset
- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja

- f. Pemisahan fungsi
 - g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
 - h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi yang terjadi
 - i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
 - j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
 - k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.
4. Informasi dan Komunikasi
- Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya :
- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, dan
 - b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
5. Pemantauan Pengendalian Intern
- Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantau berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi dan tindakan lainnya yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Mardiasmo (2009) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di suatu daerah berdasarkan peraturan daerah dan undangundang yang berlaku di mana pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Tuntutan

pendapatan asli daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri. Dalam penggalan dan peningkatan pendapatan daerah itu sendiri banyak permasalahan yang ditemukan, seperti totalnya yang begitu kecil dalam penerimaan daerah, kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah, kemampuan perencanaan dan pengawasan yang lemah.

2.2.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, sumber-sumber pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD (UU No.23/2014) yaitu :

1. Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis pajak Kota/Kabupaten :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam Bantuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walat
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perhotelan Hak atas Tanah dan Bangunan

2. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah, yang selanjutnya retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan retribusi daerah masing-masing Kota/Kabupaten dapat dilihat dari pos PAD dalam laporan realisasi anggaran APBD. Jenis retribusi daerah dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

- 1.) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan rakyat
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- f. Retribusi pelayanan pasar
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kendaraan
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta
- j. Retribusi penyediaan dan/atau penyediaan kakus
- k. Retribusi pengolahan limbah cair
- l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
- m. Retribusi pelayanan Pendidikan
- n. Retribusi pengendalian Menara telekomunikasi

2.) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
- c. Retribusi tempat pelelangan
- d. Retribusi terminal
- e. Retribusi tempat khusus parkir
- f. Retribusi tempat penginapan
- g. Retribusi rumah potong hewan
- h. Retribusi pelayanan kepelabuhan
- i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- j. Retribusi penyelenggaraan di air
- k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

3.) Jenis Retribusi Perizinan tertentu adalah:

- a. Retribusi izn mendirikan bangunan
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin trayek
- e. Retribusi izin usaha perikanan

3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah pendapatan dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan ini tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan

tersebut bertujuan untuk menunjang melangkah atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah penerimaan daerah diluar pemerintah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba usaha yang telah diuraikan diatas. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa Giro
- c. Pendapatan Bunga
- d. Keuntungan seilish nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah

Rumus Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli = Daerah Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan + Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Halim & Kusufi, 2014

2.3 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.3.1 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Dean Rois Sudrazat (2017) "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Efektivitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah"	Variabel Independen: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah	Variabel Independen: 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Pengendalian Variabel Dependen: 1. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah	Metode Analisis Deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan software SPSS (Statistical Product For Social Science) versi 22, menunjukkan bahwa pelaksanaan SPIP termasuk dalam kategori "tinggi" dengan jumlah skor penilaian 5.281. efektivitas pemungutan PAD termasuk pada kategori "tinggi", dengan jumlah skor penilaian 3.145.

					<p>Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1.Lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan pendapatan asli daerah2.Penilaian risiko berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan pendapatan asli daerah3.Kegiatan pengendalian tidak berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan pendapatan asli daerah4.Informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan pendapatan asli daerah5.Pemantauan berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan pendapatan asli daerah6.Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan (sistem pengendalian internal pemerintah) berpengaruh positif sebesar 82,6% dan signifikan terhadap efektivitas
--	--	--	--	--	--

					<p>pemungutan pendapatan asli daerah. Sebesar 17,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dari hasil tersebut dapat terlihat bahwa sistem pengendalian internal pemerintah telah dilaksanakan dengan baik, hanya saja masih terdapat permasalahan yang menyebabkan penerapan SPIP masih belum optimal. (Sudrazat, 2017)</p>
2	<p>Desi Qoriah, Muslim Al Kautsar (2017) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Garut Pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut</p>	<p>Variabel Independen: Sistem Pengendalian Intern</p> <p>Variabel Dependen: Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Pengendalian <p>Variabel Dependen(Y): Target dan realisasi Penerimaan Pajak Hotel</p>	<p>metode analisis deskriptif dan verifikatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Garut. 2.Penilaian risiko tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Garut. 3.Kegiatan pengendalian berpengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Garut. 4.Informasi dan komunikasi berpengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Garut.

					<p>5. Pemantauan berpengaruh terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Garut.</p> <p>6. Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan (Sistem Pengendalian Intern) Pemungutan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut berpengaruh sebesar 51,3% terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Garut (Qorih & Al Kautsar, 2017)</p>
3	<p>Afrizal Ahmad Abrar (2017) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>Variabel Independen: Sistem Pengendalian Intern</p> <p>Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan <p>Variabel Dependen: penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasannya, termasuk juga perubahan atas APBD</p>	<p>Teknik analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS</p>	<p>1. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan yang positif signifikan antara lingkungan pengendalian dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari t test antara X1 (lingkungan pengendalian) dengan Y (efektivitas pengelolaan keuangan daerah) menunjukkan t hitung > t tabel yaitu $2,153 > 1,989$ atau sig. t (0,034).</p> <p>2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis</p>

					<p>didapat nilai koefisien regresi dari penilaian risiko yaitu sebesar 0.690, maka pengaruh yang di dapat dari penilaian risiko terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah positif. Pengujian t test antara X2 (penilaian risiko) dengan Y (efektivitas pengelolaan keuangan daerah) didapat t hitung > t tabel yaitu 2,372>1,989 atau sig. t (0,020)</p> <p>3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis didapat nilai koefisien regresi dari kegiatan pengendalian yaitu sebesar 0.325, maka pengaruh yang di dapat dari kegiatan pengendalian terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah positif. Pengujian t test antara X3 (kegiatan pengendalian) dengan Y (efektivitas pengelolaan keuangan daerah) didapat t hitung > t tabel yaitu 2,024>1,989 atau sig. t (0,046)</p> <p>4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis didapat nilai koefisien regresi dari informasi dan</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>komunikasi yaitu sebesar 0.092, maka pengaruh yang di dapat dari informasi dan komunikasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah positif. Pengujian t test antara X4 (informasi dan komunikasi) dengan Y (efektivitas pengelolaan keuangan daerah) didapat t hitung $< t$ tabel yaitu $0,255\alpha = 0.05$ maka pengaruh X4 (informasi dan komunikasi) terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah tidak signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H_0 diterima.</p> <p>5. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis didapat nilai koefisien regresi dari pemantauan yaitu sebesar 0.554, maka pengaruh yang di dapat dari pemantauan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah positif. Pengujian t test antara X5 (pemantauan) dengan Y (efektivitas pengelolaan keuangan daerah) didapat t hitung $> t$ tabel yaitu $2,053 > 1,989$ atau sig.</p>
--	--	--	--	--	--

					t (0,043) (Abrar, 2016)
4	Andra Supryandinata Taha (2013) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Daerah terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Gorontalo	Variabel Independen: Sistem Pengendalian Intern Variabel Dependen: Pajak Daerah	Variabel Independen: 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Pengendalian Variabel Dependen: Target dan realisasi Pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pengelolaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pencapaian target penerimaan pajak daerah yang mampu memberikan pengaruh sebesar 60,9% terhadap pencapaian target penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Gorontalo. Sedangkan sisanya sebesar 39,1% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar dari variabel yang diteliti yang dapat mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah (TAHA, 2013).
5	Moh. Sofyan (2016) Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor	Variabel Independen: Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah	Variabel Independen: 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Pengendalian Variabel Dependen: 1. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah	Metode Analisis Deskriptif	Sistem pengendalian intern berpengaruh dalam pengelolaan pajak restoran Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bogor, antara lain: 1. Lingkungan Pengendalian berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. 2. Penilaian Risiko tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

			2. Target dan realisasi pajak		<p>3. Kegiatan Pengendalian berpengaruh terhadap peningkatan asli daerah.</p> <p>4. Informasi dan Komunikasi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.</p> <p>5. Pemantauan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (Sofyan, 2016)</p>
--	--	--	-------------------------------	--	---

Sumber; Jurnal dan skripsi oleh peneliti, 2023

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Sudrazat (2017), Qoriah, Al Kautsar (2017), Abrar (2017), Taha (2013), Sofyan (2016) berupa variabel independen yaitu menggunakan sistem pengendalian intern. Kemudian memiliki kesamaan dengan Sudrazat (2017) dan Sofyan (2016) berupa variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan Qoriah, Al Kautsar (2017), Abrar (2017), Taha (2013) berupa variabel dependen yaitu menggunakan pajak daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

2.3.2 Kerangka Pemikiran

2.3.2.1 Pengaruh Lingkungan Pengendalian terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah

Lingkungan pengendalian menggambarkan keseluruhan sikap organisasi yang mempengaruhi kesadaran dan Tindakan personel organisasi mengenai pengendalian. Dengan kata lain, Lingkungan pengendalian merupakan pondasi dasar yang mendasari suatu sistem pengendalian internal pemerintah. Apabila lingkungan pengendalian menunjukkan kondisi yang baik, maka dapat memberi pengaruh yang cukup baik bagi suatu organisasi, namun sebaliknya apabila lingkungan pengendalian jelek, mengindikasikan bahwa organisasi tersebut tidak sehat. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya. Oleh karena itu peneliti menduga bahwa variabel lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh (Dean Rois Sudrazat, 2017) dan (Moh. Sofyan, 2016)

2.3.2.2 Penilaian Risiko

Melalui proses penilaian resiko ini, maka setiap entitas dapat mengantisipasi setiap kejadian yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Berdasarkan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pimpinan Instansi wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri atas:

1) Identifikasi risiko

Identifikasi risiko dilaksanakan dengan:

- a. Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif.
- b. Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal.
- c. Menilai faktor lain yang meningkatkan risiko.

2) Analisis risiko

Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Pimpinan instansi pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang diterima. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh (Dean Rois Sudrazat,2017) bahwa terdapat pengaruh penilaian risiko terhadap pendapatan asli daerah.

2.3.2.3 Pengaruh Kegiatan Pengendalian terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun dengan maksud untuk memastikan pelaksanaan petunjuk yang dibuat oleh manajemen, merespon risiko yang dimiliki instansi pemerintah dan memastikan bahwa respon tersebut efektif, Kegiatan pengendalian tersebut membantu memastikan bahwa tindakan mengatasi dan menanggulangi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh (Moh. Sofyan,2016) bahwa terdapat pengaruh kegiatan pengendalian terhadap pendapatan asli daerah.

2.3.2.4 Pengaruh Informasi dan Komunikasi terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya : Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, dan Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus. Dalam

penelitian yang telah dilakukan oleh (Moh. Sofyan,2016) bahwa terdapat pengaruh informasi dan komunikasi terhadap pendapatan asli daerah.

2.3.2.5 Pengaruh Pemantauan terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah

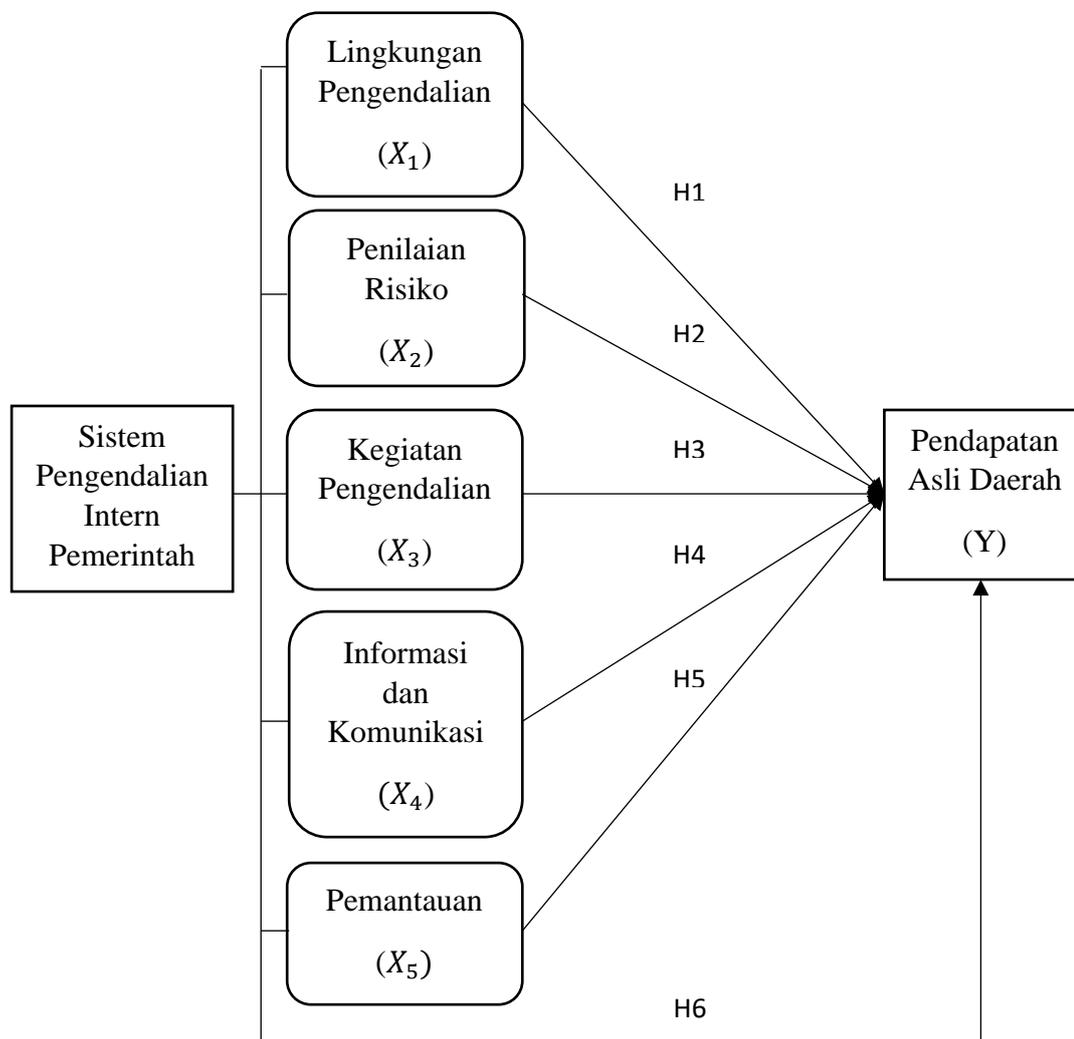
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantau berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi dan tindakan lainnya yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh (Dean Rois Sudrazat,2017) bahwa terdapat pengaruh penilaian risiko terhadap pendapatan asli daerah.

2.3.2.6 Pengaruh Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, Pemantauan (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revui, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu peneliti menduga bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Sudrazat, 2017 dan Sofyan, 2016.

Berdasarkan latar belakang masalah, landasan teori, dan uraian diatas, maka kerangka konseptual yang menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah. Kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis penelitian. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

(H₁): Lingkungan Pengendalian secara parsial berpengaruh terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2021

(H₂): Penilaian Risiko secara parsial berpengaruh terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2021

(H₃): Kegiatan Pengendalian secara parsial berpengaruh terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2021

(H₄): Informasi dan Komunikasi secara parsial berpengaruh terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2021

(H₅): Pemantauan secara parsial berpengaruh terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2021

(H₆): Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2021.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian verifikatif. Dalam penelitian yang akan diteliti nantinya akan menguji sistem pengendalian intern pemerintah sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan asli daerah Kabupaten Sukabumi. Jenis verifikatif menurut sugiyono (2018) adalah metode penelitian yang pada dasarnya digunakan untuk menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik yang digunakan untuk menguji apakah benar variabel tersebut sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2018), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretatif, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu kondisi yang menggambarkan atau menerangkan situasi dari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan gambar yang jelas dari suatu penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai variabel independen dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen.

3.2.2 Unit Analisis

Unit analisis merupakan seluruh hal yang diteliti untuk mendapatkan penjelasan secara ringkas mengenai keseluruhan unit analisis. Unit analisis penelitian ini adalah *organization* berupa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Laporan Pendapatan Asli Daerah tahun 2019-2021.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi Komplek Perkantoran Jajaway Citepus, Kec. Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43364.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.3.1 Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk uraian. Data Kualitatif dalam penelitian ini berupa laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019-2021.

3.3.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan kuesioner secara langsung kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi dan Data sekunder diperoleh dalam bentuk data laporan atau dokumen dari Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi.

3.4 Operasional Variabel

Operasional variabel digunakan untuk menjabarkan mengenai variabel yang diteliti, sub variabel, indikator, ukuran serta skala pengukuran yang akan dipahami dalam operasionalisasi variabel penelitian. Untuk mengukur variabel bebas dan variabel terikat adalah dengan menggunakan Skala Likert yang ada pada kuesioner. Menurut Sugiyono (2013) Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan Skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Setiap variabel terdapat pernyataan yang terdiri dari beberapa indikator. Setiap item diberi skor 1 sampai 5. Dengan menggunakan skala interval sebagai skala pengukuran skor 1 menunjukkan Sangat Tidak Setuju (STS). Skor 2 menunjukkan Tidak Setuju (TS), skor 3 menunjukkan Cukup Setuju (CS), skor 4 menunjukkan Setuju (S) dan skor 5 menunjukkan Sangat Setuju (SS). Berikut tabel operasional variabel dalam penelitian ini:

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Bapenda Kabupaten Sukabumi) Tahun 2019-2021

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
1. Sistem Pengendalian Intern	1. Lingkungan Pengendalian	Penilaian responden terhadap: a. Penegakan integritas dan nilai etika b. Komitmen terhadap	Ordinal

Pemerintah (Independen)		kompetensi c. Kepemimpinan yang kondusif d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif dan h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait	
	2. Penilaian Risiko	Penilaian responden terhadap: a. Identifikasi risiko b. Analisis risiko	Ordinal
	3. Kegiatan Pengendalian	Penilaian responden terhadap: a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah d. Kebijakan dan prosedur	Ordinal

		<p>harus ditetapkan secara tertulis</p> <p>e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis</p> <p>f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan</p>	
	4. Informasi dan komunikasi	<p>Penilaian responden terhadap:</p> <p>a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi</p> <p>b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus</p>	Ordinal
	5. Pemantauan	<p>Penilaian responden terhadap:</p> <p>a. Pemantauan berkelanjutan</p> <p>b. Evaluasi terpisah</p> <p>c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu</p>	Ordinal
2. Tingkat Pendapatan Asli Daerah (Dependen)	<p>1. Retribusi Daerah</p> <p>2. Pajak Daerah</p> <p>3. Pengelolaan dilakukan sesuai peraturan</p>	<p>1. Retribusi Daerah Mencapai target</p> <p>2. Pajak Daerah Mencapai Target</p> <p>3. Pengelolaan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomi, efisien, efektif, transparan,</p>	Ordinal

		bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan untuk masyarakat	
--	--	--	--

3.5 Metode Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2013), sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam hal ini sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini kriteria pengambilan sampel adalah pegawai Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi yang sudah terdaftar menjadi ASN. Dalam Penelitian ini populasi yang diambil adalah pegawai yang ada pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi. Adapun sampel yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.2

Daftar Responden

Jabatan	Jumlah
Kepala Badan Pendapatan Daerah	1
Sekretaris	1
Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian	5
Sub Bagian Keuangan	5
Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi	4
Bidang Pendataan dan Penetapan	1
Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan	7
Sub Bidang Penetapan	5
Sub Koordinator Verifikasi	4
Bidang Penagihan dan Pemeriksaan	1
Sub Bidang Penagihan	10
Sub Bidang Pemeriksaan	4
Sub Koordinator Pengaduan dan Keberatan	5
Bidang Perencanaan dan Pengendalian	1
Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan	4
Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian	4
Sub Koordinator Data dan Informasi	4
Jumlah	65

Sumber: Bapenda, 2023

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, kuisisioner, dan dokumentasi karena data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung tanpa melalui perantara. Data primer disini melalui wawancara secara langsung kepada Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi Badan Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Sukabumi dan melalui pengisian kuisisioner untuk pegawai Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi. Untuk Data sekunder diperoleh dalam bentuk data Laporan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi atau dokumen dari Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi.

3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

Untuk mempermudah pengolahan data maka penulis menggunakan bantuan SPSS versi 25. Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji kualitas data, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinicaritas, uji heterokedastisitas, analisis regresi linear sederhana, uji hipotesis, uji t, uji F dan uji koefisien determinasi.

3.7.1 Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018) statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness. Statistik deskriptif biasanya digunakan untuk menggambarkan profil data sampel sebelum memanfaatkan teknik analisis statistik yang berfungsi untuk menguji hipotesis. Statistik deskriptif dapat menjelaskan variabel-variabel yang terdapat didalam penelitian ini. Statistik deskriptif juga menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel.

3.7.2 Uji Kualitas Data

Dalam melakukan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner membutuhkan kesungguhan responden dalam menjawab pernyataan-pernyataan dan faktor situasional merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kualitas kuesioner yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Keabsahan suatu hasil penelitian sangat tergantung pada alat pengukur variabel yang akan diteliti. Alat ukur atau instrumen berupa kuesioner dikatakan memberikan hasil yang akurat dan stabil jika alat ukur itu dapat diandalkan. Jika alat yang digunakan dalam proses pengumpulan data tidak andal atau tidak dapat dipercaya, maka hasil penelitian yang diperoleh tidak akan valid. Oleh karena itu dalam penelitian ini diperlukan uji validitas dan uji reliabilitas.

3.7.2.1 Uji Validitas

Validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen bersangkutan yang mampu mengukur apa yang diukur. Uji validitas yang dilakukan bertujuan untuk menguji seluruh item pernyataan yang valid dan yang tidak valid. Pada penelitian ini uji validitas menggunakan korelasi bivariate dengan menggunakan aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 25. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Teknik yang digunakan untuk uji validitas pada penelitian ini yaitu dengan teknik korelasi Pearson Product Moment.

Pengujian validitas dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Hasil analisis korelasi bivariate dengan melihat output Pearson Correlation. Kriteria pengujian apabila nilai Pearson Correlation $< r$ tabel maka item pernyataan dikatakan tidak valid, sedangkan apabila nilai Pearson Correlation $> r$ tabel maka item pernyataan dikatakan valid.

3.7.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur andal atau tidaknya kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau andal jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Dengan demikian uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui konsisten atau tidaknya responden terhadap kuesioner-kuesioner penelitian. Dalam bukunya, (Sujarweni, 2014) menjelaskan bahwa uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir atau item pernyataan dalam angket (kuesioner) penelitian. Teknik yang digunakan untuk uji reliabilitas pada penelitian ini yaitu dengan teknik Cronbach's Alpha. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$ maka kuesioner atau angket dinyatakan reliabel atau konsisten.
2. Sementara, jika nilai Cronbach's Alpha $< 0,60$ maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terhadap model regresi digunakan agar dapat mengetahui apakah model regresi tersebut merupakan model regresi yang baik atau tidak. Uji asumsi klasik ini dilakukan untuk menyatakan normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

3.7.3.1 Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2018) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Pada uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov yaitu dengan ketentuan :

- Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data terdistribusi secara normal.
- Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal. Selain itu, peneliti juga melakukan uji normalitas dengan menggunakan PPlot. Untuk mendeteksi kenormalan nilai residual ini, dapat dilakukan dengan cara:
- Jika titik-titik data berada di dekat atau mengikuti garis diagonalnya maka dapat dikatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

- Sementara itu, jika titik-titik menjauh atau tersebar dan tidak mengikuti garis diagonal maka hal ini menunjukkan bahwa nilai residual tidak berdistribusi normal.

3.7.3.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018) uji multikolinearitas ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Persamaan model baik adalah yang tidak terdapat korelasi linear atau hubungan yang kuat antar variabel bebasnya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dengan nilai Variance Inflation Factor (VIF), nilai dari cut off yang digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah:

- Jika nilai VIF > 10 atau tolerance $< 0,10$ maka terjadi multikolonieritas.
- Jika nilai VIF < 10 atau tolerance $> 0,10$ maka tidak terjadi multikolonieritas.

3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2018) Heteroskedastisitas berarti varian variabel gangguan yang tidak konstan. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain hasilnya homoskedastisitas dimana variance residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu melalui pengujian menggunakan Spearman Rho. Dasar untuk menguji heteroskedastisitas adalah:

- Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka ada heteroskedastisitas.
- Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak ada heteroskedastisitas. Selain itu peneliti juga melakukan uji asumsi klasik dengan menggunakan Scatterplots. Berikut pedoman yang digunakan untuk memprediksi atau mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas tersebut dilakukan dengan cara melihat pola gambar scatterplots dengan ketentuan :
 - Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas.
 - Sedangkan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda adalah suatu alat analisis peramalan nilai yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen, dengan jumlah variabel independen lebih dari satu. Regresi linear

berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Formulasi persamaan:

$$Y = \alpha + \beta_1 LP + \beta_2 PR + \beta_3 KP + \beta_4 IK + \beta_5 P + e$$

Keterangan:

Y = Tingkat Pendapatan Asli Daerah

α = Konstanta

LP = Lingkungan Pengendalian

PR = Penilaian Risiko

KP = Kegiatan Pengendalian

IK = Informasi dan Komunikasi

P = Pemantauan

β_1 = Koefisien Regresi Lingkungan Pengendalian

β_2 = Koefisien Regresi Penilaian Risiko

β_3 = Koefisien Regresi Kegiatan Pengendalian

β_4 = Koefisien Regresi Informasi & Komunikasi

β_5 = Koefisien Regresi Pemantauan

e = Disturbance Error

3.7.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi (tidak terkontrol). Dalam statistik sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan.

3.7.5.1 Uji t

Menurut Ghozali, (2018) mengungkapkan uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian yang digunakan adalah hipotesis satu arah dan menggunakan signifikan 5%. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria :

- a. H_0 : Jika $t_{tabel} < t_{hitung}$ dan nilai signifikan $\geq 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- b. H_a : Jika $t_{tabel} > t_{hitung}$ dan nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.7.5.2 Uji F

Menurut (Ghozali, 2016) Uji F disini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen). Prosedur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat bebas (n - k), di mana n adalah jumlah pengamatan dan k adalah jumlah variabel.
- b. Kriteria keputusan :
 - H_0 : Uji Kecocokan model ditolak jika $\alpha > 0,05$
 - H_a : Uji Kecocokan model diterima jika $\alpha < 0,05$

3.5.7.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut (Ghozali, 2018) Koefisien determinasi R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel – variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel–variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel–variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

A. Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)

Menurut (Ghozali 2018, 179) Adjusted R^2 digunakan untuk mengetahui besarnya variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen sisanya yang tidak dapat dijelaskan merupakan bagian variasi dari variabel lain yang tidak termasuk didalam model. Hasil uji koefisien determinasi ditentukan oleh nilai Adjusted R^2 . Nilai Adjusted R^2 adalah 0 sampai 1. Jika nilai Adjusted R^2 mendekati 1, artinya variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen dan sebaliknya jika nilai Adjusted R^2 mendekati 0 artinya kemampuan variabel independen untuk memprediksi variabel dependen sangat terbatas. Apabila nilai Adjusted R^2 sama dengan 0 maka yang dapat digunakan adalah nilai R^2 .

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Berdasarkan uraian metode penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, berikut hasil dari pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti. Objek pada penelitian ini menggunakan dua variabel yang terdiri dari satu variabel independent yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai (X) sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu Tingkat Pendapatan Asli Daerah (Y). Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah organization yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah. Dalam hal ini unit analisisnya adalah para pegawai Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi yang telah terdaftar menjadi ASN. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi Komplek Perkantoran Jajaway Citepus, Kec. Palabuhanratu, Kab.Sukabumi, Jawa Barat 43364.

Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan wawancara dan menyebarkan kuisisioner secara langsung kepada responden dengan mendatangi kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi. Kuisisioner tersebut berisi pertanyaan mengenai variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah. Pengukuran variabel-variabel menggunakan instrumen berbentuk pertanyaan tertutup. Instrumen pertanyaan yang berhubungan dengan variabel independent yang diteliti serta diukur menggunakan skala *Likert* dari 1 s/d 5. Responden diminta memberikan pendapat setiap butir pertanyaan, mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Proses pendistribusian hingga pengumpulan data dilakukan pada tanggal 1-8 Agustus 2023. Dari kuisisioner yang dibagikan secara langsung melalui kertas, yang terisi yaitu sebanyak 65. Adapun perhitungan tingkat pengembalian kuisisioner tersebut disajikan dalam Tabel 4.1 dalam lampiran. Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kuisisioner yang telah disebar oleh peneliti secara langsung melalui kertas telah terisi sebanyak 65 buah.

4.1.1 Deskripsi Karakteristik Responden

Karakteristik responden digunakan untuk memberikan gambaran responden, apakah dengan karakteristik yang berbeda-beda mempunyai penilaian yang sama atau tidak. Karakteristik responden dibagi menjadi komposisi pegawai menurut jenis kelamin, komposisi pegawai menurut jabatan dan Pendidikan, komposisi PNS Bapenda menurut golongan.

1. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin

Pengelompokan responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel bawah ini:

Tabel 4.2
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Pegawai	Jenis Kelamin				Jumlah	%
	Laki-laki	%	Perempuan	%		
PNS	51	78,46%	14	21,54%	65	100%
Non PNS	38	76%	12	24%	50	100%
Jumlah	89	77,39%	26	22,61%	115	100%

Sumber: Bapenda, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa pegawai PNS berjumlah 65 orang, dari laki-laki sebanyak 51 orang dengan persentase (78,46%) sedangkan dari Perempuan sebanyak 14 orang dengan persentase (21,54%). Pegawai non PNS berjumlah 50 orang, dari laki-laki sebanyak 38 orang dengan persentase (76%) sedangkan dari Perempuan sebanyak 12 orang dengan persentase (24%).

2. Deskripsi responden berdasarkan jabatan dan Pendidikan

Pengelompokan responden berdasarkan jabatan dan Pendidikan dapat dilihat dibawah tabel ini:

Tabel 4.3
Deskripsi Responden Berdasarkan Jabatan Dan Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan/ Jumlah						
		S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	Kepala Badan		1					
2	Sekretaris		1					
3	Kepala Bidang		2	1				
4	Kepala Seksi/ Sub. Bagian		8	2				
5	Fungsional Umum/ Staf		5	32	3	10		
	Jumlah		17	35	3	10		
	Persentase		26,15%	53,84%	4,61 %	15,40%		

Sumber: bapenda, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa responden yang telah menempuh pendidikan SLTA yaitu berjumlah 10 orang dengan presentase (15,40%), untuk responden yang menempuh pendidikan D3 berjumlah 3 orang dengan presentase (4,61%) untuk responden yang menempuh pendidikan S1 berjumlah 35 orang dengan presentase (53,84%), responden dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 17 orang dengan presentase (26,15%). Sedangkan responden yang menempuh pendidikan S3 tidak terdapat dalam penelitian ini.

3. Deskripsi responden PNS Bapenda berdasarkan golongan

Pengelompokan responden berdasarkan golongan dapat dilihat dibawah tabel ini:

Tabel 4.4

Deskripsi Responden PNS Bapenda Berdasarkan Golongan

Golongan								Jumlah
IV	%	III	%	II	%	I	%	
7	10,76%	46	70,76%	12	18,46%	0	-	65

Sumber: *bapenda*, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa responden yang termasuk golongan IV berjumlah 7 orang dengan persentase (10,76%), golongan III berjumlah 46 orang dengan persentase (70,76%), golongan II berjumlah 12 orang dengan persentase (18,46%). Sedangkan responden yang termasuk golongan I tidak terdapat dalam penelitian ini.

4.1.2 Deskripsi Data Variabel

Untuk menganalisis jawaban responden terhadap variabel sistem pengendalian intern pemerintah indikator lingkungan pengendalian (X1), penilaian risiko (X2), kegiatan pengendalian (X3), informasi dan komunikasi (X4), pemantauan (X5), dan tingkat pendapatan asli daerah (Y) peneliti menggunakan 5 skala *likert*, yaitu :

- 1: Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2: Tidak Setuju (TS)
- 3: Cukup Setuju (CS)
- 4: Setuju (S)
- 5: Sangat Setuju (SS)

Berikut penilaian dari responden terkait dengan pernyataan-pernyataan variabel sistem pengendalian intern pemerintah indikator lingkungan pengendalian (X1), penilaian risiko (X2), kegiatan pengendalian (X3), informasi dan komunikasi (X4), pemantauan (X5), dan tingkat pendapatan asli daerah (Y) yang terdapat dalam kuesioner yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian

Tabel 4.5

Penilaian Responden Indikator Lingkungan Pengendalian (X1)

No Pernyataan	Penilaian Responden										Jumlah	
	STS		TS		CS		S		SS		Resp	%
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	0	0	0	0	1	1,53%	39	60%	25	38,5%	65	100
2	0	0	0	0	2	3,07%	34	52,30%	29	44,6%	65	100
3	0	0	0	0	1	1,53%	42	64,61%	22	33,8%	65	100
4	0	0	0	0	5	7,69%	41	63,07%	19	29,23%	65	100
5	0	0	0	0	6	9,23%	46	70,76%	13	13%	65	100

6	0	0	0	0	5	7,69%	44	67,69	16	24,61	65	100
7	0	0	0	0	2	3,07%	41	63,07%	22	33,84	65	100
Presentase											65	100

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 diperoleh hasil sebanyak 60% responden menjawab setuju dengan pernyataan pertama yaitu tentang penegakan integritas dan nilai etika dilakukan berdasarkan kode etik keprofesian pegawai. Pertanyaan kedua memperoleh 52,30% menjawab setuju bahwa pimpinan yang kondusif dalam mengkomunikasikan kendala-kendala yang dihadapi bawahan. Pertanyaan ketiga sebanyak 64,61% responden menjawab setuju bahwa pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. Pertanyaan keempat sebanyak 63,07% menjawab setuju bahwa pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang ditetapkan telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi pegawai. Pertanyaan kelima sebanyak 70,76% menjawab setuju bahwa penyusunan dan penerapan kebijakan diklat dalam pembinaan pegawai terlaksana dengan baik. Pertanyaan keenam 67,69% menjawab setuju bahwa pimpinan dalam melakukan setiap tindakan kebijakan atau prosedur mencerminkan sikap tentang pentingnya pengendalian intern. Pertanyaan ketujuh 63,07% menjawab setuju bahwa kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh orang-orang yang kompeten.

2. Penilaian Resiko

Tabel 4.6

Penilaian Responden Indikator Penilaian Resiko (X2)

No Pernyataan	Penilaian Responden										Jumlah	
	STS		TS		CS		S		SS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	Resp	%
1	0	0	0	0	1	1,53%	37	56,92%	27	41,53%	65	100
2	0	0	0	0	1	1,53%	44	67,69%	20	30,76%	65	100
3	0	0	0	0	4	6,15%	38	58,46%	23	35,38%	65	100
4	0	0	0	0	2	3,07%	32	49,23%	31	47,69%	65	100
5	0	0	0	0	8	12,30%	41	63,07%	16	24,61%	65	100
Presentase											65	100

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa untuk item pernyataan-pernyataan yang paling banyak menjawab yang masing-masing persentasenya adalah pernyataan pertama 56,92% menjawab setuju bahwa penilaian kebenaran akan keberadaan atau keterjadian pendapatan asli daerah pemerintah selama periode akuntansi terlaksana sesuai yang diharapkan. Pertanyaan kedua 67,69% menjawab setuju bahwa penilaian kelengkapan semua transaksi dan akun yang ada dalam pendapatan asli daerah terlaksana sesuai yang diharapkan. Pertanyaan ketiga 58,46% menjawab setuju bahwa penilaian dan alokasi penyajian pendapatan asli daerah dengan angka-angka yang benar terlaksana sesuai yang diharapkan. Pertanyaan keempat 49,23% menjawab

setuju bahwa penyajian dan pengungkapan komponen dalam pendapatan asli daerah terlaksana dengan baik. Pertanyaan kelima 63,07% menjawab setuju bahwa informasi baru mengenai risiko, biaya dan manfaat pemakaian teknologi disosialisasikan kepada pegawai.

3. Kegiatan Pengendalian

Tabel 4.7
Penilaian Responden Indikator Kegiatan Pengendalian (X3)

No Pernyataan	Penilaian Responden										Jumlah	
	STS		TS		CS		S		SS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	Resp	%
1	0	0	0	0	11	16,92%	35	53,84%	19	29,23%	65	100
2	0	0	0	0	8	12,30%	41	63,07%	16	24,61%	65	100
3	0	0	0	0	5	7,69%	38	58,46%	22	33,84%	65	100
4	0	0	0	0	5	7,69%	44	67,69%	16	24,61%	65	100
5	0	0	0	0	3	4,61%	39	60%	23	35,38%	65	100
Presentase											65	100

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa untuk item pernyataan-pernyataan yang paling banyak menjawab yang masing-masing persentasenya adalah pernyataan pertama 53,84% menjawab setuju bahwa kegiatan pengendalian internal pemerintah dilaksanakan sesuai prosedur otoritas yang memadai. Pertanyaan kedua 63,07% menjawab setuju bahwa kegiatan pengendalian dengan adanya pemisahan tugas sudah terlaksana memadai sesuai yang diharapkan. Pertanyaan ketiga 58,46% menjawab setuju bahwa kegiatan pengendalian dengan perencanaan dan penggunaan dokumen atau catatan terlaksana memadai. Pertanyaan keempat 67,69% menjawab setuju bahwa kegiatan pengendalian pengamanan atas akses atau penggunaan aktiva dan catatan terlaksana memadai. Pertanyaan kelima 60% menjawab setuju bahwa aktivitas pengendalian selalu dievaluasi untuk meningkatkan kinerja.

4. Informasi dan Komunikasi

Tabel 4.8
Penilaian Responden Indikator Informasi dan Komunikasi (X4)

No Pernyataan	Penilaian Responden										Jumlah	
	STS		TS		CS		S		SS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	Resp	%
1	0	0	0	0	5	7,69%	35	53,84%	25	38,46%	65	100
2	0	0	0	0	7	10,76%	38	58,46%	20	30,76	65	100
3	0	0	0	0	3	4,61%	40	61,53%	22	33,84	65	100
4	0	0	0	0	5	7,69%	44	67,69%	16	24,61	65	100
Presentase											65	100

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa untuk item pernyataan-pernyataan yang paling banyak menjawab yang masing-masing persentasenya adalah pernyataan pertama 53,84% menjawab setuju bahwa organisasi menghasilkan informasi berkualitas untuk mendukung fungsi pengendalian internal. Pertanyaan kedua 58,46% menjawab setuju bahwa organisasi menggunakan informasi yang relevan dalam mendukung fungsi pengendalian internal. Pertanyaan ketiga 61,53% menjawab setuju bahwa organisasi mengkomunikasikan informasi secara tepat dalam mendukung pengendalian internal. Pertanyaan keempat 67,69% menjawab setuju bahwa organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal secara terus menerus.

5. Pemantauan

Tabel 4.9
Penilaian Responden Indikator Pemantauan (X5)

No Pernyataan	Penilaian Responden										Jumlah	
	STS		TS		CS		S		SS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	Resp	%
1	0	0	0	0	5	7,69%	35	53,84%	25	38,46%	65	100
2	0	0	0	0	1	1,53%	45	69,23%	19	29,23%	65	100
3	0	0	1	1,53%	8	12,30%	42	64,61%	14	21,53%	65	100
4	0	0	0	0	3	4,61%	38	58,46%	24	36,92%	65	100
Presentase											65	100

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa untuk item pernyataan-pernyataan yang paling banyak menjawab yang masing-masing persentasenya adalah pernyataan pertama 53,84% menjawab setuju bahwa pemantauan terhadap frekuensi penilaian aktivitas pengendalian internal pemerintah sesuai yang ditetapkan. Pertanyaan kedua 69,23% menjawab setuju bahwa pemantauan pelaksanaan fungsi internal audit terlaksana dengan baik. Pertanyaan ketiga 64,61% menjawab setuju bahwa pemantauan saran dari akuntan terlaksana dengan baik. Pertanyaan keempat 58,46% menjawab setuju bahwa pemantauan rekonsiliasi laporan secara periodik terlaksana dengan baik.

6. Tingkat Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4.10
Penilaian Responden Variabel Tingkat Pendapatan Asli Daerah (Y)

No Pernyataan	Penilaian Responden										Jumlah	
	STS		TS		N		S		SS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	Resp	%
1	0	0	0	0	0	0	40	61,53%	25	38,46%	65	100
2	0	0	0	0	0	0	46	70,76%	19	29,23%	65	100
3	0	0	0	0	0	0	50	76,92%	15	23,07%	65	100
4	0	0	0	0	0	0	39	60%	26	40%	65	100
Presentase											65	100

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa untuk item pernyataan-pernyataan yang paling banyak menjawab yang masing-masing persentasenya adalah pernyataan pertama 61,53% menjawab setuju bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2021 mencapai target. Pernyataan kedua 70,76% menjawab setuju bahwa Retribusi Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2021 mencapai target. Pernyataan ketiga 76,92% menjawab setuju bahwa Pajak Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2021 mencapai target. Pernyataan keempat 60% menjawab setuju bahwa pengelolaan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomi, efisien, efektif, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan untuk Masyarakat.

4.2 Metode Pengolaan Data/Analisis Data

Dalam menguji “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Bapenda Kabupaten Sukabumi) Tahun 2019-2021” dilakukan dengan menggunakan pengujian statistik. Analisis regresi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan software Statistical Product for Service Solution (SPSS) versi 25. Adapun indikator variabel yang digunakan untuk penelitian ini yaitu Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Resiko (X2), Kegiatan Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4), Pemantauan (X5), dan Tingkat Pendapatan Asli Daerah (Y).

4.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk melihat sebaran data sampel, dimana peneliti menggunakan nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Statistic deskriptif masing-masing variabel yang digunakan dalam seluruh model penelitian dapat dilihat dalam tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Lingkungan Pengendalian	65	22	35	29.91	2.602
Penilaian Risiko	65	18	25	21.55	1.985
Kegiatan Pengendalian	65	17	25	20.98	2.246
Informasi dan Komunikasi	65	13	20	16.97	1.952
Pemantauan	65	13	20	16.97	1.714
Tingkat Pendapatan Asli Daerah	65	16	20	17.31	1.402
Valid N (listwise)	65				

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25, 2023

Dari tabel 4.11 di atas dapat diketahui informasi tentang nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (mean), serta standar deviasi masing-masing variabel. Berdasarkan tabel 4.11 di atas dapat disajikan hasil statistik deskriptif sebagai berikut:

- a. Lingkungan Pengendalian (X1)
Indikator lingkungan pengendalian diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 7 pertanyaan. Indikator lingkungan pengendalian memiliki nilai minimum sebesar 22, nilai maksimum sebesar 35. Nilai rata-rata (mean) untuk seluruh responden yaitu 29,91 standar deviasi menunjukkan ukuran variasi data terhadap mean (jarak rata-rata data terhadap mean). Standar deviasi untuk indikator adalah sebesar 2,602. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data lingkungan pengendalian memiliki keragaman data yang kecil.
- b. Penilaian Risiko (X2)
Indikator penilaian risiko diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 5 pertanyaan. Indikator penilaian risiko memiliki nilai minimum sebesar 18, nilai maksimum 25. Nilai rata-rata (mean) untuk seluruh responden yaitu 21,55 standar deviasi menunjukkan ukuran variasi data terhadap mean (jarak rata-rata data terhadap mean). Standar deviasi untuk indikator penilaian risiko sebesar 1,985. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data penilaian risiko memiliki keragaman yang kecil.
- c. Kegiatan Pengendalian (X3)
Indikator kegiatan pengendalian diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 5 pertanyaan. Indikator kegiatan pengendalian memiliki nilai minimum sebesar 17, nilai maksimum 25. Nilai rata-rata (mean) untuk seluruh responden yaitu 20,98 standar deviasi menunjukkan ukuran variasi data terhadap mean (jarak rata-rata data terhadap mean). Standar deviasi untuk indikator kegiatan pengendalian sebesar 2,246. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data kegiatan pengendalian memiliki keragaman yang kecil.
- d. Informasi dan Komunikasi (X4)
Indikator informasi dan komunikasi diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 4 pertanyaan. Indikator informasi dan komunikasi memiliki nilai minimum sebesar 13, nilai maksimum 20. Nilai rata-rata (mean) untuk seluruh responden yaitu 16,97 standar deviasi menunjukkan ukuran variasi data terhadap mean (jarak rata-rata data terhadap mean). Standar deviasi untuk indikator informasi dan komunikasi sebesar 1,952. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data penilaian risiko memiliki keragaman yang kecil.
- e. Pemantauan(X5)
indikator pemantauan diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 4 pertanyaan. Variabel tingkat pendapatan asli daerah memiliki nilai minimum sebesar 13, nilai maksimum 20. Nilai rata-rata (mean) untuk seluruh responden yaitu 16,97 standar deviasi menunjukkan ukuran variasi data terhadap mean (jarak rata-rata data terhadap mean). Standar deviasi untuk indikator pemantauan sebesar

1,714. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data pemantauan memiliki keragaman yang kecil.

f. Tingkat pendapatan asli daerah (Y)

Variabel tingkat pendapatan asli daerah diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 4 pertanyaan. Variabel tingkat pendapatan asli daerah memiliki nilai minimum sebesar 16, nilai maksimum 20. Nilai rata-rata (mean) untuk seluruh responden yaitu 17,31 standar deviasi menunjukkan ukuran variasi data terhadap mean (jarak rata-rata data terhadap mean). Standar deviasi untuk variabel tingkat pendapatan asli daerah sebesar 1,402. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data penilaian risiko memiliki keragaman yang kecil.

Seluruh indikator dan variabel memiliki nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai mean yang mempresentasikan bahwa penyimpangan data rendah. Penyimpangan data rendah artinya nilai data telah terdistribusi dengan merata.

4.2.2 Hasil Uji Kualitas Data

Pada penelitian ini akan dilakukan uji kualitas data untuk mengetahui bahwa data penelitian yang digunakan untuk memperoleh hasil yang valid dan dapat diandalkan. Uji validitas dilakukan dengan analisis *bivariate* yakni melihat korelasi antara masing-masing indikator dengan total skor konstruk. Dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df)= $n-2$, dalam hal ini adalah jumlah sampel. Jumlah sampel (n) dalam penelitian ini adalah 65, sehingga besarnya df yaitu $65-2= 63$, dengan signifikan 5% didapat dari r tabel= 0,2441, Apabila nilai r hitung > dari r tabel maka dapat dikatakan semua indikator variabel adalah valid. Tabel 4.12 dibawah ini akan menunjukkan hasil dari uji validitas dengan menggunakan SPSS 25.

Tabel 4.12
Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah indikator Lingkungan Pengendalian (X1)

No	Instrumen Penelitian	Corrected Item-Total Correlation r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	Pernyataan 1	0.664	0,2441	Valid
2	Pernyataan 2	0.567	0,2441	Valid
3	Pernyataan 3	0.715	0,2441	Valid
4	Pernyataan 4	0.758	0,2441	Valid
5	Pernyataan 5	0.671	0,2441	Valid
6	Pernyataan 6	0.802	0,2441	Valid
7	Pernyataan 7	0.669	0,2441	Valid

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 25, 2023

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas, hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item instrument di dalam variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah indikator Lingkungan Pengendalian yang diuji dalam penelitian ini dinyatakan bahwa

masing-masing instrument pernyataan dianggap valid karena *Corrected Item-Total Correlation* > r_{tabel} pada signifikan 0,05 (5%).

Tabel 4.13

Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah indikator Penilaian Risiko (X2)

No	Instrumen Penelitian	Corrected Item-Total Correlation r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	Pernyataan 1	0.670	0,2441	Valid
2	Pernyataan 2	0.697	0,2441	Valid
3	Pernyataan 3	0.782	0,2441	Valid
4	Pernyataan 4	0.660	0,2441	Valid
5	Pernyataan 5	0.782	0,2441	Valid

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 25, 2023

Berdasarkan Tabel 4.13 di atas, hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item instrument di dalam variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah indikator Penilaian Risiko yang di uji dalam penelitian ini dinyatakan bahwa masing-masing pernyataan dianggap valid karena *Corrected Item-Total Correlation* > r_{tabel} pada signifikan 0,05 (5%).

Tabel 4.14

Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah indikator Kegiatan Pengendalian (X3)

No	Instrumen Penelitian	Corrected Item-Total Correlation r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	Pernyataan 1	0.776	0,2441	Valid
2	Pernyataan 2	0.848	0,2441	Valid
3	Pernyataan 3	0.683	0,2441	Valid
4	Pernyataan 4	0.778	0,2441	Valid
5	Pernyataan 5	0.691	0,2441	Valid

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 25, 2023

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item instrument didalam variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah indikator Kegiatan Pengendalian yang diuji dalam penelitian ini dinyatakan bahwa masing-masing instrument pernyataan dianggap valid karena *Corrected Item-Total Correlation* > r_{tabel} pada signifikan 0,05 (5%).

Tabel 4.15

Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah indikator Informasi dan Komunikasi (X4)

No	Instrumen Penelitian	Corrected Item-Total Correlation r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	Pernyataan 1	0.847	0,2441	Valid
2	Pernyataan 2	0.913	0,2441	Valid
3	Pernyataan 3	0.807	0,2441	Valid
4	Pernyataan 4	0.781	0,2441	Valid

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 25, 2023

Berdasarkan Tabel 4.15 di atas, hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item instrument di dalam variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah indikator Informasi dan Komunikasi yang di uji dalam penelitian ini dinyatakan bahwa masing-masing instrument pernyataan dianggap valid karena *Corrected Item-Total Correlation* > r_{tabel} pada signifikan 0,05 (5%).

Tabel 4.16

Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah indikator Pemantauan (X5)

No	Instrumen Penelitian	Corrected Item-Total Correlation r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	Pernyataan 1	0.756	0,2441	Valid
2	Pernyataan 2	0.726	0,2441	Valid
3	Pernyataan 3	0.835	0,2441	Valid
4	Pernyataan 4	0.659	0,2441	Valid

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 25, 2023

Berdasarkan Tabel 4.16 di atas, hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item instrument di dalam variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah indikator Pemantauan yang di uji dalam penelitian ini dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena *Corrected Item-Total Correlation* > r_{tabel} pada signifikan 0,05 (5%).

Tabel 4.17

Hasil Uji Validitas Tingkat Pendapatan Asli Daerah (Y)

No	Instrumen Penelitian	Corrected Item-Total Correlation r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	Pernyataan 1	0.689	0,2441	Valid
2	Pernyataan 2	0.855	0,2441	Valid
3	Pernyataan 3	0.824	0,2441	Valid
4	Pernyataan 4	0.655	0,2441	Valid

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 25, 2023

Berdasarkan Tabel 4.17 di atas, hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item instrument di dalam variabel Tingkat Pendapatan Asli Daerah yang di uji dalam penelitian ini dinyatakan bahwa masing-masing instrument pernyataan dianggap valid karena *Corrected Item-Total Correlation* > r_{tabel} pada signifikan 0,05 (5%).

Tabel 4.18
Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lingkungan Pengendalian) (X1)	0.818	7	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Penilaian Risiko) (X2)	0.766	5	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Kegiatan Pengendalian) (X3)	0.810	5	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Informasi dan Komunikasi) (X4)	0.859	4	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Pemantauan) (X5)	0.731	4	Reliabel
Tingkat Pendapatan Asli Daerah (Y)	0.740	4	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan data dengan SPSS 25, 2023

Berdasarkan Tabel 4.18 di atas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* dari semua variabel yang digunakan pada penelitian ini lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan seluruh variabel yaitu dinyatakan reliabel atau andal sehingga dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui bahwa data penelitian yang digunakan sudah tepat untuk dilakukan analisis regresi linear sederhana. Uji asumsi klasik ini dilakukan untuk menyatakan normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas.

1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independent dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Dapat dikatakan jika berdistribusi normal jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (Sig. > 0,05). Berikut hasil uji normalitas pada penelitian ini.

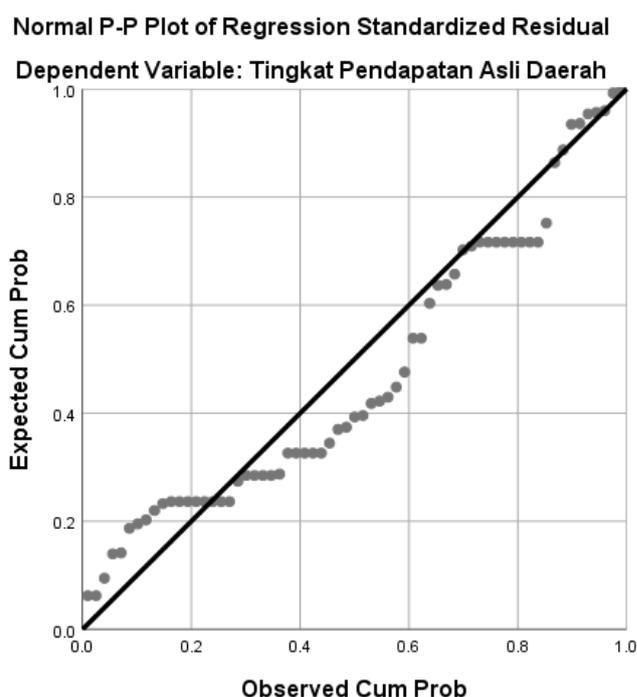
Tabel 4.19
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.000000
	Std. Deviation	.88209284
Most Extreme Differences	Absolute	.086
	Positive	.086

	Negative	-.071
Test Statistic		.086
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 25, 2023

Pada Tabel 4.19 di atas, uji normalitas menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov*, dapat dilihat hasil di atas menunjukkan nilai signifikansi yang didapatkan adalah sebesar 0,200 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi.



Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik plotting mengikuti dan mendekati garis diagonalnya. Oleh karena itu, sebagaimana dasar atau pedoman pengambilan keputusan dalam uji normalitas Teknik probability plot dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal dan asumsi terpenuhi.

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent atau variabel dependen. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Uji multikolinearitas menghasilkan nilai tolerance dan VIF dari setiap variabel bebas, apabila nilai tolerance $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 , maka tidak terjadi multikolinearitas dalam data dan asumsi terpenuhi. Berikut hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini :

Tabel 4.20
Hasil Uji Multikolinearitas

<i>Coefficient^a</i>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.890	1.079		3.607	.001		
	Lingkungan Pengendalian	.076	.044	.141	1.739	.087	.528	1.894
	Penilaian Risiko	.099	.072	.140	1.381	.173	.336	2.975
	Kegiatan Pengendalian	-.089	.061	-.143	-1.452	.152	.361	2.772
	Informasi dan Komunikasi	.003	.072	.004	.044	.965	.349	2.869
	Pemantauan	.683	.080	.779	7.925	.000	.360	2.780

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25, 2023

Berdasarkan Tabel 4.20 di atas diketahui bahwa setiap indikator dari variable Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menunjukkan bahwa nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10. Dimulai dari indikator Lingkungan Pengendalian sebesar $0,528 > 0,10$. Indikator Penilaian Risiko sebesar $0,336 > 0,10$. Indikator Kegiatan Pengendalian sebesar $0,361 > 0,10$. Indikator Informasi dan Komunikasi sebesar $0,349 > 0,10$. Dan indikator Pemantaun sebesar $0,360 > 0,10$.

Selain itu, setiap indikator dari variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah juga menunjukkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10,00. Dimulai dari indikator Lingkungan Pengendalian sebesar $1,894 < 10,00$. Indikator Penilaian Risiko sebesar $2,975 < 10,00$. Indikator Kegiatan Pengendalian sebesar $2,772 < 10,00$. Indikator Informasi dan Komunikasi sebesar $2,869 < 10,00$. Dan indikator Pemantauan sebesar $2,780 < 10,00$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas dan asumsi terpenuhi.

1. Hasil Uji Heterokesdatisitas

Uji heterokesdatisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika signifikansi $> 0,05$ maka tifak terjadi masalah heterokesdatisitas dan asumsi terpenuhi. Berikut hasil uji heterokesdatisitas pada penelitian ini :

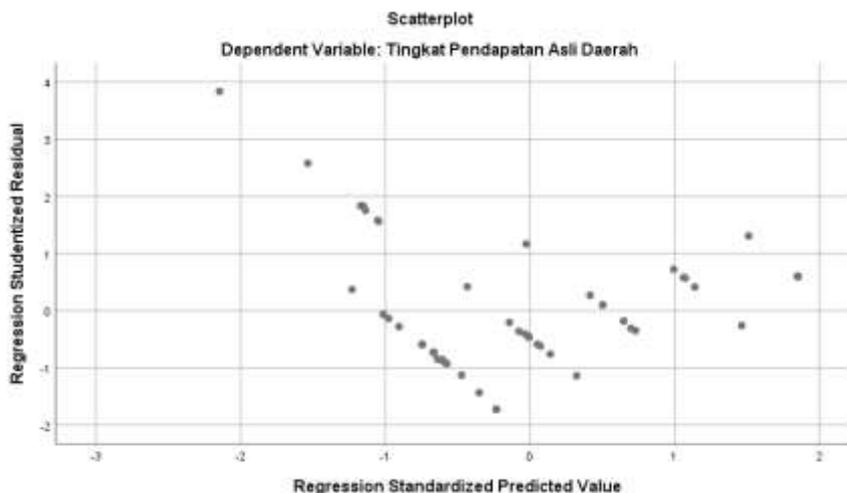
Tabel 4.21
Hasil Uji Heterokedastisitas

			Correlations					
			Lingkungan Pengendalian	Penilaian Risiko	Kegiatan Pengendalian	Informasi dan Komunikasi	Pemantauan	Unstandarized Residual
S p e r m a n' s r h o	Lingkung an Pengendal ian	Correlation Coefficient	1.000	.439**	.526**	.599**	.574**	.163
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.000	.000	.195
		N	65	65	65	65	65	65
	Penilaian Risiko	Correlation Coefficient	.439**	1.000	.712**	.671**	.652**	.210
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.000	.000	.094
		N	65	65	65	65	65	65
	Kegiatan Pengendal ian	Correlation Coefficient	.526**	.712**	1.000	.667**	.514**	.210
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.000	.000	.093
		N	65	65	65	65	65	65
	Informasi dan Komunika si	Correlation Coefficient	.599**	.671**	.667**	1.000	.660**	.175
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.	.000	.163
		N	65	65	65	65	65	65
	Pemantau an	Correlation Coefficient	.574**	.652**	.514**	.660**	1.000	.216
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.	.084
		N	65	65	65	65	65	65
	Unstandar dized Residual	Correlation Coefficient	.163	.210	.210	.175	.216	1.000
		Sig. (2-tailed)	.195	.094	.093	.163	.084	.
		N	65	65	65	65	65	65

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25, 2023

Berdasarkan Tabel 4.21 di atas diketahui bahwa setiap indikator dari variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dimulai dari indikator Lingkungan Pengendalian sebesar $0,195 > 0,05$. Indikator Penilaian Risiko sebesar $0,094 > 0,05$. Indikator Kegiatan Pengendalian sebesar $0,093 > 0,05$. Indikator Informasi dan Komunikasi sebesar $0,163 > 0,05$. Dan indikator Pemantauan sebesar $0,084 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas dan asumsi terpenuhi.



Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sedangkan berdasarkan output Scatterplots di atas diketahui bahwa:

1. Titik-titik data penyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
2. Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
3. Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar Kembali.
4. Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas, hingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi.

Berdasarkan ketiga uji data di atas (uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas), data yang digunakan dalam model regresi memenuhi syarat dalam kelayakan pengujian data. Hasil dari estimasi model regresi variabel independent Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan) terhadap variabel dependen Tingkat Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sudah menggambarkan keadaan sebenarnya.

4.2.4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.22

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.890	1.079		3.607	.001
	Lingkungan Pengendalian	.076	.044	.141	1.739	.087
	Penilaian Risiko	.099	.072	.140	1.381	.173
	Kegiatan Pengendalian	-.089	.061	-.143	-1.452	.152
	Informasi dan Komunikasi	.003	.072	.004	.044	.965
	Pemantauan	.638	.080	.779	7.925	.000

a. Dependent Variable: Tingkat Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 25, 2023

Keterangan :

Y = Tingkat Pendapatan Asli Daerah

α = Konstanta

LP = Lingkungan Pengendalian

PR = Penilaian Risiko

KP = Kegiatan Pengendalian

IK = Informasi dan Komunikasi

P = Pemantauan

β_1 = Koefisien Regresi Lingkungan Pengendalian

β_2 = Koefisien Regresi Penilaian Risiko

β_3 = Koefisien Regresi Kegiatan Pengendalian

β_4 = Koefisien Regresi Informasi dan Komunikasi

β_5 = Koefisien Regresi Pemantauan

e = Disturbance Error

Maka,

$$Y = \alpha + \beta_1 LP + \beta_2 PR + \beta_3 KP + \beta_4 IK + \beta_5 P + e$$

atau

$$Y = 3,890 + 0,076LP + 0,099PR + (-0,089)KP + 0,003IK + 0,638P + e$$

Sehingga persamaan regresi linear berganda tersebut memiliki interpretasi sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 3,890 artinya apabila lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi&komunikasi, dan pemantauan dianggap konstan (bernilai nol) maka Tingkat Pendapatan Asli Daerah bernilai sebesar 3,890.
2. Koefisien regresi indikator lingkungan pengendalian bernilai positif sebesar 0,076, artinya setiap terjadi kenaikan lingkungan pengendalian sebesar 1 satuan maka tingkat pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,076 dengan asumsi nilai indikator lainnya tetap.
3. Koefisien regresi indikator penilaian risiko bernilai positif sebesar 0,099, artinya setiap terjadi kenaikan penilaian risiko sebesar 1 satuan maka tingkat pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,099 dengan asumsi nilai indikator lainnya tetap.
4. Koefisien regresi indikator kegiatan pengendalian bernilai negatif sebesar -0,089, artinya setiap terjadi kenaikan penilaian 1 satuan maka tingkat pendapatan asli daerah akan mengalami penurunan sebesar -0,089, dengan asumsi nilai indikator lainnya tetap.
5. Koefisien regresi indikator informasi dan komunikasi bernilai positif sebesar 0,003, artinya setiap terjadi kenaikan informasi dan komunikasi sebesar 1 satuan maka tingkat pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,003, dengan asumsi nilai indikator lainnya tetap.
6. Koefisien regresi indikator pemantauan bernilai positif sebesar 0,638, artinya setiap terjadi kenaikan pemantauan sebesar 1 satuan maka tingkat pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,638 dengan asumsi nilai indikator lainnya tetap.

Hasil analisis regresi berganda untuk variabel independen memberi pengaruh positif terhadap tingkat pendapatan asli daerah.

4.2.5 Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 (Sig. < 0,05), maka suatu variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Koefisien regresi masing-masing variabel independen bila dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $-t_{hitung} < t_{tabel}$ dicari dengan signifikansi 0,05 (uji satu sisi) dengan tingkat derajat kebebasan $df = n - k$ atau $df = 65 - 5 = 60$. Maka nilai t_{tabel} yang di dapatkan yaitu sebesar 2,000.

Berikut ini hasil uji t dari penelitian ini dengan tingkat pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen :

Tabel 4.23
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.890	1.079		3.607	.001
	Lingkungan Pengendalian	.076	.044	.141	1.739	.087
	Penilaian Risiko	.099	.072	.140	1.381	.173
	Kegiatan Pengendalian	-.089	.061	-.143	-1.452	.152
	Informasi dan Komunikasi	.003	.072	.004	.044	.965
	Pemantauan	.638	.080	.779	7.925	.000

a. Dependent Variable: Tingkat Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 25, 2023

Berdasarkan hasil Tabel 4.23 di atas, berikut adalah interpretasi atas hasil uji t tersebut:

1. Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh Lingkungan Pengendalian (X1) terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah sebesar $0,087 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 1,739 < t_{tabel} 2,000$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak yang berarti Lingkungan Pengendalian tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah (Y)
 2. Diketahui nilai Sig. untuk Penilaian Risiko (X2) terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah sebesar $0,173 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 1,381 < t_{tabel} 2,000$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 ditolak yang berarti Penilaian Risiko tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah (Y).
 3. Diketahui nilai Sig. untuk Kegiatan Pengendalian (X3) terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah sebesar $0,152 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} -1,452 < t_{tabel} 2,000$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak yang berarti Kegiatan Pengendalian tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah (Y).
 4. Diketahui nilai Sig. untuk Informasi dan Komunikasi (X4) terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah sebesar $0,965 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 0,044 < t_{tabel} 2,000$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_4 ditolak yang berarti Informasi dan Komunikasi tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah (Y).
 5. Diketahui nilai Sig. untuk Pemantauan (X5) terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah sebesar $0,00 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 7,925 > t_{tabel} 2,000$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_5 diterima yang berarti Pemantauan berpengaruh terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah (Y).
2. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama atau simultan. Apabila nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka variabel independent secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Cara menentukan nilai F_{tabel} yaitu $df1 = k-1$ dan $df2 = n-k$. Maka $df1 = 5-1 = 4$ dan $df2 = 65-5 = 60$. Sehingga nilai F_{tabel} yang didapatkan yaitu sebesar 2,76. Berikut merupakan hasil uji F di dalam penelitian ini :

Tabel 4.24
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	100.033	5	20.007	45.728	.000 ^b
	Residual	25.813	59	.438		
	Total	125.846	64			
a. Dependent Variable: Tingkat Pendapatan Asli Daerah						
b. Predictors: (Constant), Pemantauan, Informasi dan Komunikasi, Kegiatan Pengendalian, Penilaian Risiko, Lingkungan Pengendalian						

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS 25, 2023

Berdasarkan hasil uji F pada tabel Tabel 4.2.3 di atas dapat diperoleh nilai signifikansi untuk pengaruh lingkungan pengendalian (X1), Penilaian Risiko (X2), Kegiatan Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4), dan Pemantauan (X5) secara simultan terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 45,728 > F_{tabel} 2,76$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel independen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dari kelima indikator yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan secara simultan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah, sehingga H_6 diterima.

3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang semakin mendekati 1 variabel-variabel independent semakin mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Berikut merupakan hasil uji koefisien determinasi di dalam penelitian ini :

Tabel 4.25
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.892 ^a	.795	.778	.661

a. Predictors: (Constant), Pemantauan, Informasi dan Komunikasi, Kegiatan Pengendalian, Penilaian Risiko, Lingkungan Pengendalian

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS 25, 2023

Hasil tabel 4.25 menjelaskan tentang ringkasan model yang terdiri dari nilai korelasi berganda, (R) , koefisien determinasi (R square), koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R square*) dan ukuran kesalahan prediksi (*Std. Error of the Estimate*), antara lain :

1. R menunjukkan nilai korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel independent terhadap variabel dependen. Nilai R berkisar dari 0 sampai 1, jika nilai R mendekati 1 maka hubungan semakin kuat. Angka R yang didapat dalam penelitian ini adalah 0,892 yang berarti korelasi antara variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,892. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat erat antara variabel independen dengan variabel dependen .
2. R square (R^2) untuk menunjukkan koefisien determinasi yaitu persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen jika dalam regresi menggunakan tidak lebih dari dua variabel independent. Angka R square (R^2) yang didapat dalam penelitian ini adalah 0,795.
3. *Adjusted R square* adalah R Square yang telah disesuaikan yaitu persentase ini sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,778 yang berarti bahwa variabel independent Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lingkungan pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan) mempengaruhi variabel dependen (Tingkat Pendapatan Asli Daerah) sebesar 77,8% dan sisanya 22,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.
4. *Standard error of the estimate* adalah ukuran kesalahan prediksi. Nilai *standard error of the estimate* dalam penelitian ini sebesar 0,661 yang merupakan kesalahan yang dapat terjadi dalam memprediksi Tingkat Pendapatan Asli Daerah.

4.3 Pembahasan

Analisis target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tahun 2019-2021:

Tabel 4.26
Target dan Realisasi Rincian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi
(Dalam ribuan rupiah)
2019-2021

Tahun	Uraian	Target	Realisasi	%
2019	PENDAPATAN ASLI DAERAH	598.844.771.544	619.788.612.705	103,49%
	PAJAK DAERAH	251.577.000.000	267.563.178.178	106,35%
	RETRIBUSI DAERAH	32.016.588.983	31.584.515.373	98,65%
	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	8.464.000.000	8.484.535.608	100,24%
	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	306.827.182.561	312.156.383.546	101,74%
2020	PENDAPATAN ASLI DAERAH	624.253.231.412	660.864.220.832	105,86%
	PAJAK DAERAH	253.852.000.000	271.104.869.700	106,80%
	RETRIBUSI DAERAH	21.332.000.000	22.272.616.631	104,41%
	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	11.537.549.879	11.538.137.143	100,01%
	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	337.531.681.533	355.948.597.358	105,86%
2021	PENDAPATAN ASLI DAERAH	651.923.206.231	676.557.376.024	103,78%
	PAJAK DAERAH	269.732.000.000	285.482.201.266	105,84%
	RETRIBUSI DAERAH	19.593.435.000	16.182.957.674	82,59%
	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	10.343.000.000	10.368.839.763	100,25%
	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	352.254.771.231	364.523.377.321	103,48%

Pada tabel 4.26 di atas mengenai realisasi pendapatan asli daerah kabupaten sukabumi tahun 2019-2021, pada tahun 2019 realisasi pendapatan mencapai Rp619.788.612.705, pada tahun 2020 realisasi pendapatan asli daerah mencapai Rp660.864.220.832 dan pada tahun 2021 realisasi pendapatan asli daerah mencapai Rp676.557.376.024 dalam hal ini untuk tingkat pendapatan asli daerah tahun 2019-2021 setiap tahun nya mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2019 ke 2020 peningkatan yang terjadi mencapai Rp41.075.608.127 sedangkan dari tahun 2020 ke 2021 peningkatan yang terjadi mencapai Rp 15.693.155.192.

Pajak daerah kabupaten sukabumi tahun 2019-2021, pada tahun 2019 realisasi pajak daerah mencapai Rp267.563.178.178, pada tahun 2020 realisasi pajak daerah mencapai Rp271.104.869.700, dan pada tahun 2021 realisasi pajak daerah mencapai Rp285.482.201.266. Dalam hal ini untuk pajak daerah tahun 2019-2021 setiap tahun nya mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2019-2020 peningkatan yang terjadi

mencapai Rp3.541.691.522 sedangkan dari tahun 2020-2021 peningkatan yang terjadi mencapai Rp14.377.331.566.

Retribusi daerah kabupaten sukabumi tahun 2019-2021, pada tahun 2019 realisasi retribusi daerah tidak mencapai target dengan nominal Rp31.584.515.373, pada tahun 2020 realisasi retribusi daerah mencapai Rp22.272.616.631, dan pada tahun 2021 realisasi retribusi daerah tidak mencapai target dengan nominal Rp 16.182.957.674. Dalam hal ini retribusi daerah tahun 2019-2020 mengalami penurunan Rp9.311.898.742 dan retribusi daerah tahun 2020-2021 mengalami penurunan Rp6.089.658.957.

Berdasarkan tabel 4.27 dalam lampiran, dapat diuraikan sebagai berikut:

- target pajak hotel pada tahun 2019 target pajak hotel sebesar Rp3.300.000.000 dan mencapai target realisasi Rp3.959.944.966, di tahun 2020 target pajak hotel mengalami penurunan sebesar Rp1.800.000.000 dan mencapai target sebesar Rp2.133.061.086 dan di tahun 2021 target pajak hotel mengalami kenaikan sebesar Rp2.500.000.000 dan mencapai target sebesar Rp3.188.528.126.
- target pajak restoran pada tahun 2019 pajak restoran sebesar Rp9.100.000.000 dan mencapai target realisasi Rp11.037.452.858, target pajak restoran tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp6.500.000.000 dan mengalami penurunan target realisasi sebesar Rp7.601.708.862, target pajak restoran tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp7.500.000.000 dan mencapai target Rp9.492.704.183.
- target pajak hiburan tahun 2019 sebesar Rp700.000.000 dan realisasi Rp768.453.143, target pajak hiburan tahun 2020 sebesar Rp195.000.000 dan realisasi sebesar Rp214.672.788, target pajak hiburan tahun 2021 sebesar Rp120.000.000 dan realisasi sebesar Rp135.563.482.
- target pajak penerangan jalan tahun 2019 target sebesar Rp54.500.000.000 dan realisasi sebesar Rp55.778.893.657, tahun 2020 pajak penerangan jalan target sebesar Rp50.000.000.000 dan realisasi sebesar Rp52.191.417.728, tahun 2021 target sebesar Rp52.000.000.000 dan realisasi sebesar Rp53.671.140.330.
- target pajak parkir tahun 2019 sebesar Rp270.000.000 dan realisasi sebesar Rp315.619.990, target pajak parkir tahun 2020 sebesar Rp250.000.000 dan realiasi mencapai Rp256.655.566, target pajak parkir tahun 2021 sebesar Rp225.000.000 dan realisasi mencapai Rp257.209.775.

Berdasarkan tabel 4.28 dalam lampiran, dapat di uraikan sebagai berikut:

- target retribusi daerah tahun 2019 sebesar Rp32.061.588.983 dan realiasi sebesar Rp31.584.515.373, target retribusi daerah tahun 2020 sebesar Rp21.332.000.000 dan realisasi Rp22.272.616.631, target retribusi daerah tahun 2021 sebesar Rp19.593.435.000 dan realisasi mencapai Rp16.182.957.674
- target retribusi jasa umum tahun 2019 sebesar Rp11.036.088.983 dan realisasi mencapai Rp10.889.781.524, target retribusi jasa umum tahun 2020 sebesar

Rp4.756.500.000 dan realisasi mencapai Rp4.641.051.700, target retribusi jasa umum tahun 2021 sebesar Rp4.338.500.000 realisasi mencapai Rp4.677.238.050

- target retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum sebesar Rp150.000.000 dan realisasi sebesar Rp92.248.000, target retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum sebesar Rp75.000.000 dan realisasi mencapai Rp55.076.000, target retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum sebesar Rp40.000.000 dan realisasi mencapai Rp25.936.000
- target retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2019 sebesar Rp1.800.000.000 dan realisasi mencapai Rp1.713.548.250, target retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2020 sebesar Rp1.200.000.000 dan realisasi mencapai Rp1.417.010.500, target retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2021 sebesar Rp1.210.000.000 dan realisasi mencapai Rp1.408.223.250
- target retribusi laboratorium patologi klinik tahun 2019 sebesar Rp250.000.000 dan realisasi mencapai Rp268.340.500, target retribusi laboratorium patologi klinik tahun 2020 sebesar Rp250.000.000 dan realisasi mencapai Rp193.553.500, sedangkan di tahun 2021 tidak ada retribusi laboratorium patologi klinik.
- Target retribusi pelayanan pasar ikan tahun 2019 sebesar Rp40.000.000 dan realisasi mencapai Rp42.268.000, target retribusi pelayanan pasar ikan tahun 2020 sebesar Rp30.000.000 dan realisasi mencapai Rp30.718.000 sedangkan di tahun 2021 tidak ada retribusi pelayanan pasar ikan.
- Target retribusi rumah potong hewan tahun 2019 sebesar Rp110.000.000 dan realisasi mencapai Rp115.115.000, Target retribusi rumah potong hewan tahun 2020 sebesar Rp95.000.000 dan realisasi mencapai Rp109.618.000, Target retribusi rumah potong hewan tahun 2021 sebesar Rp77.050.000 dan realisasi mencapai Rp66.851.000
- Target retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun 2019 sebesar Rp1.485.500.000 dan realisasi mencapai Rp634.903.000, Target retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun 2020 sebesar Rp1.465.500.000 dan realisasi mencapai Rp355.817.500, Target retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun 2021 sebesar Rp860.000.000 dan realisasi mencapai Rp536.100.000
- Target retribusi izin mendirikan bangunan/IMB dinas tahun 2019 sebesar Rp11.635.000.000 dan realisasi mencapai Rp12.967.282.224, Target retribusi izin mendirikan bangunan/IMB dinas tahun 2020 sebesar Rp8.616.000.000 dan realisasi mencapai Rp9.553.684.715, Target retribusi izin mendirikan bangunan/IMB dinas tahun 2021 sebesar Rp9.435.000.000 dan realisasi mencapai Rp6.334.174.759.
- Target retribusi izin trayek tahun 2019 sebesar Rp105.000.000 dan realisasi sebesar Rp115.914.000, Target retribusi izin trayek tahun 2020 sebesar

Rp163.000.000 dan realisasi mencapai Rp86.800.000, Target retribusi izin trayek tahun 2021 sebesar Rp163.000.000 dan realisasi mencapai Rp79.778.000.

- Target retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing tahun 2019 sebesar Rp4.200.000.000 dan realisasi mencapai Rp3.573.616.100, Target retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing tahun 2020 sebesar Rp3.400.000.000 dan realisasi mencapai Rp4.461.873.656, Target retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing tahun 2021 sebesar Rp2.700.000.000 dan realisasi mencapai Rp2.322.927.540

Tabel 4.29

Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan tahun 2019-2021

Tahun	Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan
2019	<ul style="list-style-type: none"> - Pengukuran kinerja agar dikembangkan dengan teknologi informasi - Dalam penyajian IKU harus mengacu kepada kriteria IKU yang baik yaitu <i>SMART (Specific, Measureable, Achievable, Relevance dan Timebound)</i> - Penggunaan website dalam publikasi dokumen perencanaan, laporan kinerja, PK, dan IKU
2020	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment - Membuat pengukuran kinerja untuk dikembangkan dengan menggunakan teknologi informasi - Mempublikasikan Renstra, Perjanjian Kinerja (PK), dan Indikator Kinerja Utama - Melakukan pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi yang dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan)
2021	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment - Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional, dan pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam penyesuaian (<i>Refocusing</i>) organisasi. - dokumen laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (<i>Benchmark Kinerja</i>) - informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian utama pimpinan, namun belum terdokumentasikan sepenuhnya

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Berikut unsur-unsur SPIP berdasarkan PP No.80 tahun 2008:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menggambarkan keseluruhan sikap organisasi yang mempengaruhi kesadaran dan tindakan personel organisasi mengenai pengendalian. Dengan kata lain, lingkungan pengendalian merupakan

pondasi yang mendasari suatu sistem pengendalian intern pemerintah. Apabila lingkungan pemerintah menunjukkan kondisi yang baik, maka dapat memberi pengaruh yang cukup baik bagi suatu organisasi, namun sebaliknya apabila lingkungan pengendalian jelek, mengindikasikan bahwa organisasi tersebut tidak sehat. Oleh karena itu, bapenda mempunyai dasar peraturan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja yang mereka lakukan yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan evaluasi ini dilakukan oleh inspektorat kabupaten sukabumi terhadap bapenda kabupaten sukabumi. Laporan hasil evaluasi dalam 3 tahun terakhir menunjukkan penilaian yang diberikan oleh inspektorat kepada bapenda pada tahun 2019 memperoleh nilai sebesar 72,99 dengan kategori BB (Sangat Baik), pada tahun 2020 memperoleh nilai sebesar 72,99 dengan kategori BB (Sangat Baik), dan pada tahun 2021 memperoleh nilai sebesar 75,25 dengan kategori BB (Sangat Baik). Meskipun dalam 3 tahun tersebut bapenda mendapatkan penilaian dengan kategori sangat baik, masih terdapat rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan. Sehingga hal tersebut belum mampu mendorong terhadap peningkatan pendapatan asli daerah secara menyeluruh. Meski begitu, ada beberapa catatan untuk perbaikan yang telah dilaksanakan dengan baik seperti telah mempublikasikan Renstra, Perjanjian Kerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU), melakukan upload data laporan kinerja dalam website, pengukuran kinerja telah dilakukan dan didukung dengan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai pedoman dalam mengukur indikator kinerja. Namun masih terdapat catatan yang belum diperbaiki dan masih berulang seperti membuat pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun di lingkungan pengendalian sudah berjalan cukup baik namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti membuat pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment sehingga belum mampu mendorong terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

2. Penilaian Risiko

a. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko telah mendukung sistem pengendalian intern pemerintah dengan dilakukannya pendataan potensial pajak daerah dan

retribusi daerah pada tiap bulan untuk meningkatkan tingkat pendapatan asli daerah.

Identifikasi risiko yang dilakukan oleh bapenda untuk memperingatkan wajib pajak dan retribusi daerah dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga dapat mengurangi terjadinya penurunan wajib pajak dan retribusi daerah untuk menyetor kewajibannya. Dengan terlaksananya identifikasi risiko, maka diharapkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah meningkat dari tahun 2019-2021 dan dapat mempengaruhi tingkat pendapatan asli daerah tahun 2019-2021.

b. Analisis risiko

Analisis risiko yang dilakukan oleh bapenda kabupaten sukabumi adalah penentuan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Analisis risiko yang dilakukan bapenda kabupaten sukabumi adalah penentuan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Analisis risiko dalam hal ini berupa pandemic covid yang tidak teridentifikasi sebelumnya, masih rendahnya kesadaran wajib pajak, kurangnya pendataan mengenai potensial wajib pajak dan penerimaan pemasukan retribusi yang bisa berdampak pada pendapatan asli daerah yang kurang maksimal, seperti beberapa jenis pajak yang mengalami permasalahan yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan, pajak parkir di tahun 2019-2021 ada yang mengalami penurunan wajib pajak dan ada juga yang mengalami fluktuasi pemasukan wajib pajak. Selain itu retribusi daerah dan beberapa jenis retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum, pelayanan parkir tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi laboratorium patologi klinik, retribusi pelayanan pasar ikan, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek, retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing di tahun 2019-2021 mengalami penurunan pemasukan retribusi akibat dampak dari *pandemic covid*.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa penilaian risiko sudah dilakukan namun ada beberapa hal yang tidak bisa diantisipasi seperti pandemic covid yang berdampak pada rendahnya wajib pajak dan turun nya penerimaan retribusi daerah sehingga peningkatan pendapatan asli daerah kurang maksimal.

3. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun dengan maksud untuk memastikan pelaksanaan petunjuk yang dibuat oleh manajemen, merespon risiko yang dimiliki instansi pemerintah dan memastikan bahwa respon tersebut efektif, kegiatan tersebut membantu memastikan bahwa tindakan mengatasi dan menanggulangi risiko telah

dilaksanakan secara efektif. Seperti ada beberapa hal catatan yang telah di evaluasi dan diperbaiki oleh bapenda yaitu ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sudah memenuhi kriteria *SMART* (*Spesific, Measurable, Achievable, Relevan* dan *Timebound*), pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala (bulanan, triwulan), setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang direncanakan. Namun ada beberapa hal yang mana masih belum bisa berjalan dengan baik seperti capaian target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja belum sepenuhnya tercapai, pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional, dan pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam penyesuaian (*Refocusing*) organisasi. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan pengendalian yang dilakukan bapenda sudah berjalan cukup baik, namun ada beberapa hal yang belum bisa memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah seperti capaian target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja belum sepenuhnya tercapai, pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional, dan pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam penyesuaian (*Refocusing*) organisasi.

4. Informasi dan komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Informasi dan komunikasi yang telah diperbaiki dan dilakukan oleh bapenda seperti penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai, informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja, informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya. Namun ada beberapa informasi yang belum berjalan dengan baik dan semestinya seperti dokumen laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*), informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian utama pimpinan, namun belum terdokumentasikan sepenuhnya. Sehingga berdasarkan pernyataan diatas bisa dapat diambil kesimpulan mengenai informasi dan komunikasi yang telah dilakukan bapenda belum sepenuhnya baik dikarenakan ada beberapa hal yang belum bisa berjalan dengan baik dan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah seperti dokumen laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*), informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian utama pimpinan, namun belum terdokumentasikan sepenuhnya.

5. Pemantauan

Pimpinan instansi wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern pemerintah. Pemantauan sistem pengendalian intern yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revid lainnya. Hal ini dilakukan oleh Bapenda di tahun 2019-2021 mendapatkan laporan hasil revid mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari inspektorat kabupaten Sukabumi yang mana ada beberapa catatan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Bapenda seperti laporan monitoring dan evaluasi kinerja, perencanaan kinerja sudah menyajikan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebelumnya, rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala melalui evaluasi revid triwulan dan laporan bulanan SISMONTPEPRA, dan evaluasi kinerja internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah, evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan sesuai standar mengacu pada Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 71 Tahun 2020 Tentang pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pernyataan diatas bisa dapat diambil kesimpulan bahwa mengenai pemantauan yang telah dilaksanakan Bapenda berjalan dengan baik, hal ini didasari dari beberapa evaluasi yang telah dilaksanakan seperti evaluasi kinerja internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah, evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan sesuai standar mengacu pada Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 71 Tahun 2020 Tentang pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah sehingga diharapkan mampu memberikan dampak dan dorongan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Analisis tersebut didukung dengan hasil penelitian yang diuraikan secara statistik dengan menggunakan SPSS versi 25 dengan uji t (parsial) dan uji F (simultan), maka disajikan hasil dari hipotesis penelitian, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.30

Matriks Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Kode	Hipotesis	Hasil
H1	Lingkungan Pengendalian secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2021	Ditolak
H2	Penilaian Risiko secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2021	Ditolak
H3	Kegiatan Pengendalian secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2021	Ditolak
H4	Informasi dan Komunikasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2021	Ditolak

H5	Pemantauan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2021	Diterima
H6	Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2021	Diterima

Sumber: hasil pengolahan data dengan SPSS 25, 2023

Tabel 4.17 menjelaskan hasil dari hipotesis penelitian sehingga menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

1. H_1 : Ditolak

Berdasarkan hasil koefisien regresi indikator lingkungan pengendalian yaitu sebesar 0,076 (positif) dan hasil uji t indikator lingkungan pengendalian memiliki nilai $t_{hitung} 1,739 < t_{tabel} 2,000$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,087 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lingkungan pengendalian secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah. Namun demikian, karena tanda koefisien regresi lingkungan pengendalian bernilai positif maka apabila derajat lingkungan pengendalian ditingkatkan maka pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan asli daerah akan meningkat.

2. H_2 : Ditolak

Berdasarkan hasil koefisien regresi indikator penilaian risiko yaitu sebesar 0,099 (positif) dan hasil uji t indikator penilaian risiko memiliki nilai $t_{hitung} 1,381 < t_{tabel} 2,000$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,173 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penilain risiko secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah. Namun demikian, karena tanda koefisien regresi penilain risiko bernilai positif maka apabila derajat penilaian risiko ditingkatkan maka pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan asli daerah akan meningkat.

3. H_3 : Ditolak

Berdasarkan hasil koefisien regresi indikator kegiatan pengendalian yaitu sebesar -0,089 (negatif) dan hasil uji t indikator kegiatan pengendalian memiliki nilai $t_{hitung} -1,452 < t_{tabel} 2,000$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,152 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengendalian tidak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah. Namun demikian, karena tanda koefisien regresi kegiatan pengendalian bernilai negatif maka apabila derajat kegiatan pengendalian ditingkatkan maka pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan asli daerah tidak akan meningkat.

4. H_4 : Ditolak

Berdasarkan hasil koefisien regresi indikator informasi dan komunikasi yaitu sebesar 0,003 (positif) dan hasil uji t indikator informasi dan komunikasi memiliki nilai $t_{hitung} 0,044 < t_{tabel} 2,000$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,965 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah. Namun demikian, karena tanda koefisien regresi informasi dan komunikasi bernilai positif maka apabila derajat informasi

dan komunikasi ditingkatkan maka pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan asli daerah akan meningkat.

5. H_5 : Diterima

Berdasarkan hasil koefisien regresi indikator pemantauan yaitu sebesar 0,638 (positif) dan hasil uji t indikator pemantauan memiliki nilai $t_{hitung} 7,925 > t_{tabel} 2,000$ dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemantauan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan asli daerah.

6. H_6 : Diterima

Berdasarkan hasil analisis linear berganda yaitu $Y = 3,890 + 0,076 + 0,099 - 0,089 + 0,003 + 0,638 + e$ (positif) dan hasil uji F pada tabel 4.17 dapat diketahui bahwa lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi&komunikasi, dan pemantauan memiliki nilai $F_{hitung} 45,728 > F_{tabel} 2,76$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini sistem pengendalian intern pemerintah (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan asli daerah.

4.3.1 Interpretasi Hasil Penelitian

Dengan dilakukannya pengujian hipotesis statistik oleh penulis pada Dinas Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2021 dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 25 tentang pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap tingkat pendapatan asli daerah maka penulis menginterpretasikan hasil penelitian yang diperkuat dengan teori-teori yang ada dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Pengaruh Lingkungan Pengendalian terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian diatas menggunakan uji parsial (t) diperoleh nilai $t_{hitung} 1,739 < t_{tabel} 2,000$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,087 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lingkungan pengendalian secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah. Ditinjau dari analisis dan hasil jawaban responden bahwa penegakan integritas dan nilai etika, pimpinan yang kondusif, struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah dijalankan dengan baik.

Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Dean Rois Sudrazat (2017) dengan judul penelitian “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Efektivitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah” menyatakan bahwa lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan pendapatan asli daerah.

2. Pengaruh Penilaian Risiko terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan hasil koefisien regresi indikator penilaian risiko yaitu sebesar 0,099 (positif) dan hasil uji t indikator penilaian risiko memiliki nilai $t_{hitung} 1,381 < t_{tabel} 2,000$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,173 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penilain risiko secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah. Tidak berpengaruhnya penilaian risiko dikarenakan pandemic covid yang tidak teridentifikasi sebelumnya, rendahnya wajib pajak dan pemasukan retribusi yang menurun, kurangnya pendataan yang potensial terhadap pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Dean Rois Sudrazat (2017) dengan judul penelitian “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Efektivitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah” menyatakan bahwa penilaian risiko berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan pendapatan asli daerah.
3. Pengaruh Kegiatan pengendalian terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan hasil koefisien regresi indikator kegiatan pengendalian yaitu sebesar -0,089 (negatif) dan hasil uji t indikator kegiatan pengendalian memiliki nilai $t_{hitung} -1,452 < t_{tabel} 2,000$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,152 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengendalian tidak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah. Namun demikian, karena tanda koefisien regresi kegiatan pengendalian bernilai negatif maka apabila derajat kegiatan pengendalian ditingkatkan maka pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan asli daerah tidak akan meningkat. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Moh. Sofyan,2016) dengan judul “Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor” yang mengatakan bahwa kegiatan pengendalian berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
4. Pengaruh Informasi dan komunikasi terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan hasil koefisien regresi indikator informasi dan komunikasi yaitu sebesar 0,003 (positif) dan hasil uji t indikator informasi dan komunikasi memiliki nilai $t_{hitung} 0,044 < t_{tabel} 2,000$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,965 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah. Namun demikian, karena tanda koefisien regresi informasi dan komunikasi bernilai positif maka apabila derajat informasi dan komunikasi ditingkatkan maka pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan asli daerah akan meningkat. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh oleh (Moh. Sofyan,2016) dengan judul “Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan

Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor” yang mengatakan bahwa Informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

5. Pengaruh Pemantauan terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil koefisien regresi indikator pemantauan yaitu sebesar 0,638 (positif) dan hasil uji t indikator pemantauan memiliki nilai $t_{hitung} 7,925 > t_{tabel} 2,000$ dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemantauan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan asli daerah.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Dean Rois Sudrazat (2017) dengan judul penelitian “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Efektivitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah” menyatakan bahwa pemantauan berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan pendapatan asli daerah.

6. Pengaruh Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, pemantauan (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil analisis linear berganda yaitu $Y = 3,890 + 0,076 + 0,099 - 0,089 + 0,003 + 0,638 + e$ (positif) dan hasil uji F pada tabel 4.17 dapat diketahui bahwa lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi&komunikasi, dan pemantauan memiliki nilai $F_{hitung} 45,728 > F_{tabel} 2,76$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini sistem pengendalian intern pemerintah (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan asli daerah.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Dean Rois Sudrazat (2017) dengan judul penelitian “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Efektivitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah” Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan software SPSS (Statistical Product For Social Science) versi 22, menunjukkan bahwa pelaksanaan SPIP termasuk dalam kategori “tinggi” dengan jumlah skor penilaian 5.281. efektivitas pemungutan PAD termasuk pada kategori “tinggi”, dengan jumlah skor penilaian 3.145. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan (sistem pengendalian internal pemerintah) berpengaruh positif sebesar 82,6% dan signifikan terhadap efektivitas pemungutan pendapatan asli daerah. Sebesar 17,4%

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dari hasil tersebut dapat terlihat bahwa sistem pengendalian internal pemerintah telah dilaksanakan dengan baik, hanya saja masih terdapat permasalahan yang menyebabkan penerapan SPIP masih belum optimal.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan mengenai pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap tingkat pendapatan asli daerah (studi empiris BAPENDA KABUPATEN SUKABUMI) TAHUN 2019-2021). Berikut beberapa simpulan yang dapat penulis Tarik dari hasil penelitian ini:

1. Lingkungan pengendalian secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah hal ini didukung dengan pengujian menggunakan statistik pada uji t dimana lingkungan pengendalian memiliki nilai $t_{hitung} 1,739 < t_{tabel} 2,000$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,087 > 0,05$. Hal ini disebabkan tidak adanya pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment sehingga belum mampu mendorong terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
2. Penilaian risiko secara parsial penilaian risiko tidak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah hal ini didukung dengan pengujian menggunakan statistik pada uji t dimana penilaian risiko memiliki nilai $t_{hitung} 1,381 < t_{tabel} 2,000$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,173 > 0,05$. Hal ini dikarenakan ada hal yang tidak bisa diantisipasi seperti pandemic covid yang berdampak pada rendahnya wajib pajak dan turun nya penerimaan retribusi daerah sehingga peningkatan pendapatan asli daerah kurang maksimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penilaian risiko tidak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah.
3. Kegiatan pengendalian secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah hal ini didukung dengan pengujian menggunakan statistik pada uji t dimana penilaian risiko memiliki nilai $t_{hitung} -1,425 < t_{tabel} 2,000$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,152 > 0,05$. Hal ini dikarenakan ada beberapa hal yang belum bisa memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah seperti capaian target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja belum sepenuhnya tercapai, pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional, dan pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam penyesuaian (*Refocusing*) organisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengendalian tidak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah.
4. Informasi dan komunikasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah hal ini didukung dengan menggunakan pengujian statistik pada uji t dimana penilaian risiko memiliki nilai $t_{hitung} 0,044 < t_{tabel} 2,000$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,965 > 0,05$. Hal ini dikarenakan ada beberapa hal yang belum bisa berjalan dengan baik dan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah seperti dokumen laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di

level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*), informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian utama pimpinan, namun belum terdokumentasikan sepenuhnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah.

5. Pemantauan secara parsial berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah hal ini didukung dengan menggunakan pengujian statistik pada uji t dimana penilaian risiko memiliki nilai $t_{hitung} 7,925 < t_{tabel} 2,000$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini dikarenakan yang telah dilaksanakan bapenda berjalan dengan baik, hal ini didasari dari beberapa evaluasi yang telah dilaksanakan seperti evaluasi kinerja internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah, evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan sesuai standar mengacu pada Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 71 Tahun 2020 Tentang pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah sehingga diharapkan mampu memberikan dampak dan dorongan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemantauan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah.
6. Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, Pemantauan (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) secara simultan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah hal ini didukung dengan menggunakan pengujian statistik pada uji f dimana secara simultan sistem pengendalian intern pemerintah memiliki nilai $f_{hitung} 45,728 < f_{tabel} 2,76$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dapat terlihat bahwa sistem pengendalian internal pemerintah telah dilaksanakan dengan baik, hanya saja masih terdapat permasalahan yang menyebabkan penerapan SPIP masih belum optimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti mengajukan beberapa saran sebagai masukan maupun pertimbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya mengenai akuntansi sektor publik, diantaranya yaitu:

1. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, khususnya bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini mencoba untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap tingkat pendapatan asli daerah. Dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern pemerintah dan tingkat pendapatan asli daerah. Selain itu, peneliti menyarankan untuk menambahkan variabel independen lain yang berkaitan dengan indikator

sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pendapatan asli daerah guna mengetahui variabel yang berpengaruh dan memperkuat agar hasil dari penelitian menjadi lebih maksimal. Serta disarankan pula agar memperluas lokasi penelitian sehingga hasil penelitian lebih dapat digeneralisasi.

2. Bagi Praktisi

Bagi BAPENDA yang menjadi subjek penelitian ini berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel sistem pengendalian intern pemerintah terhadap tingkat pendapatan asli daerah, peneliti berharap bapenda agar:

- a. Membuat pedoman capaian kinerja untuk eselon IV keatas sehingga dapat dijadikan pedoman pada penilaian kinerja.
- b. Melakukan insentififikasi yaitu mengoptimalkan penggalian penerimaan retribusi daerah, pajak terhadap subjek serta objek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dan melakukan ekstentifikasi agar bisa memperluas penerimaan retribusi daerah, pajak secara efektif sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.
- c. Menekankan capaian target perencanaan kinerja agar sepenuhnya tercapai, menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar penempatan/penghapusan dan penyesuaian (*Refocusing*) organisasi.
- d. Dokumen laporan kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*), informasi dalam laporan kinerja harus terdokumentasikan sepenuhnya.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pemerintah dalam melihat penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pencapaian target dan tujuan organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, A. A. (2016). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Bpkad Kabupaten Malang)*. 1–23.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Qoriah, D., & Al Kautsar, M. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Garut Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. *Jurnal Wacana Ekonomi, Vol. 16*(No. 3), 134–139. www.jurnal.uniga.ac.id
- Redaksi.Sukabumiekspres. (2022). *Bapenda 'Kecolongan' Pendapatan Pajak Dari Hotel Dan Restoran Ilegal*. Sukabumi Ekspres.Net. <https://sukabumi.jabarekspres.com/2022/06/22/bapenda-kecolongan-pendapatan-pajak-dari-hotel-dan-restoran-ilegal/>
- Sofyan, M. (2016). Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bogor. *Jurnal Eksekutif, 13*(1), 59–77. <http://jurnal.ibmt.ac.id/index.php/jeksekutif/article/view/107>
- Sudrazat, D. R. (2017). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Spip) Terhadap Efektivitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Cimahi)*. Politeknik Negeri Bandung.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian Lengkap Praktis Dan Mudah Dipahami*. Pustaka Baru Press.
- Taha, A. S. (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Daerah Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah. *Skripsi, 1*(921409050). <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/921409050/pengaruh-sistem-pengendalian-intern-pengelolaan-pajak-daerah-terhadap-pencapaian-target-penerimaan-pajak-daerah.html>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?P=22499>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vitto Pratama Putra

Alamat : Kp. Kenari RT 002/ RW 012 Palabuhanratu,
Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi

Tempat dan tanggal lahir : Sukabumi, 06 September 2001

Agama : Islam

Pendidikan :

- SD : SDN 2 Palabuhanratu
- SMP : SMPN 1 Palabuhanratu
- SMA : SMAN 1 Palabuhanratu
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Januari 2024

Peneliti

Vitto Pratama Putra

LAMPIRAN I Surat Perizinan



Universitas Pakuan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A" S1 Bisnis Digital "Terakreditasi"

Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 148 /WD.1/FEB-UP/II/2023 16 Februari 2023
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Riset / Magang / Data
 Kepada : Yth. Pimpinan
 BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KABUPATEN SUKABUMI
 Jl. Komplek perkantoran Jajaway Citepus, Kecamatan Pelabuhanratu
 Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43364.

Dengan hormat

Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah seminar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk melaksanakan Riset/Magang/Data pada Kantor/Intansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama : Vitto Pratama Putra
 NPM : 022119010
 Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengijinkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA.,CAPM.

Tembusan :
 Yth. Bapak Dekan FEB – UP (Sebagai Laporan).



Universitas Pakuan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A" S1 Bank Digital "Terakreditasi"

Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 174 /WD.1/FEB-UP/II/2023 24 Februari 2023
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Riset / Magang / Data

Kepada : Yth. Pimpinan
 BADAN KESBANGPOL KABUPATEN SUKABUMI
 Jl. Siliwangi Pelabuhanratu No.10 Pelabuhanratu
 Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43164.

Dengan hormat

Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah seminar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk melaksanakan Riset/Magang/Data pada Kantor/Intansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama : Vitto Pratama Putra
 NPM : 022119010
 Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengizinkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Tembusan :
 Yth. Bapak Dekan FEB – UP (Sebagai Laporan).



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
BADAN PENDAPATANDAERAH**

KOMPLEKS PERKANTORAN JAJAWAY TEL.FAX. (0266) 433620
WEBSITE : www.bapenda.sukabumikab.go.id
EMAIL : bapendakabsmi@yahoo.com
PALABUHANRATU - SUKABUMI 43364

Palabuhanratu, 24 Februari 2023
01 Sya'ban 1444

Nomor : 00-9.2 / 1304 - sekret / 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
hal : Surat Jawaban Riset/Magang/Data

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Universitas Pakuan
Bogor
di
TEMPAT

Disampaikan dengan hormat, Berdasarkan surat dari Universitas Pakuan Bogor dan Bisnis, Nomor 174/WD.1/FEB-UP/II/2023, tanggal 24 Februari 2023 Hal Permohonan Riset/Magang, atas nama :

Nama : **VITTO PRATAMA PUTRA**
NIM : 022119010
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Jl.Pakuan P.O Box 452 Bogor.

Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan menerima Mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Riset/Magang/Data pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi terhitung mulai tanggal 27 Februari Tahun 2023 s/d 27 Mei Tahun 2023.

Demikian surat ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


H. AISAH, SE, AK, M.Sc
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196612191990032005



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

KOMPLEKS PERKANTORAN JAJAWAY TEL.FAX. (0266) 433620
WEBSITE : www.bapenda.sukabumikab.go.id
EMAIL : bapenda@sukabumikab.go.id
PALABUHANRATU - SUKABUMI 43364

SURAT KETERANGAN

Nomor : 00.9.2 / 5077 - SURK / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Hj. AISAH, SE. AK., M.Sc**
NIP : 196602131990032005
Gol/Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Menerangkan dengan sesungguhnya :

Nama : **VITTO PRATAMA PUTRA**
NIM : 022119010
Program Studi : S-1 Akuntansi
Universitas : Universitas Pakuan Bogor
Alamat : Jl.Pakuan P.O Box 452 Bogor

Benar telah melakukan penelitian berupa penyebaran kuisioner pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi terhitung mulai tanggal 01 s/d 08 agustus 2023, guna memperoleh bahan-bahan untuk Menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan sebagaimana mestinya.

Palabuhanratu, 09 Agustus 2023
Kepala,



Lampiran II Kuesioner Kosong

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019-2021

Petunjuk:

√ Tanggapilah pernyataan dibawah ini dengan memberi tanda (v) secara objektif.

√ Dimohon untuk membaca pernyataan secara hati-hati dan menjawab dengan lengkap karena apabila terdapat salah satu nomor tidak diisi maka kuesioner dianggap tidak berlaku.

√ Tidak ada jawaban salah atau benar dalam pilihan anda, yang penting adalah mengisi jawaban yang paling sesuai dengan keadaan anda sebenarnya.

√ Pengisian Kuesioner di isi oleh pegawai Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi yang berstatus ASN

1=Sangat Tidak Setuju (STS)

3=Cukup Setuju(CS)

2=Tidak Setuju (TS)

4=Setuju (T)

5=Sangat Setuju (SS)

Nama:						
Bidang:						
NO	PERTANYAAN	STS 1	TS 2	CS 3	S 4	SS 5
Lingkungan Pengendalian						
1	Penegakan integritas dan nilai etika dilakukan berdasarkan kode etik keprofesian pegawai					
2	Pimpinan yang kondusif dalam mengkomunikasikan kendala-kendala yang dihadapi bawahan					
3	Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan					
4	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang ditetapkan telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi pegawai					
5	Penyusunan dan penerapan kebijakan diklat dalam pembinaan pegawai terlaksana dengan baik					
6	Pimpinan dalam melakukan setiap Tindakan kebijakan atau prosedur mencerminkan sikap tentang pentingnya pengendalian intern					
7	Kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh orang-orang yang kompeten					
Penilaian Risiko						

8	Penilaian kebenaran akan keberadaan atau keterjadian pendapatan asli daerah pemerintah selama periode akuntansi terlaksana sesuai yang diharapkan					
9	Penilaian kelengkapan semua transaksi dan akun yang ada dalam pendapatan asli daerah terlaksana sesuai yang diharapkan					
10	Penilaian dan alokasi penyajian pendapatan asli daerah dengan angka-angka yang benar terlaksana sesuai yang diharapkan					
11	Penyajian dan pengungkapan komponen dalam pendapatan asli daerah terlaksana dengan baik.					
12	Informasi baru mengenai risiko, biaya dan manfaat pemakaian teknologi disosialisasikan kepada pegawai.					
Kegiatan Pengendalian						
13	Kegiatan pengendalian internal pemerintah dilaksanakan sesuai prosedur otoritas yang memadai					
14	Kegiatan pengendalian dengan adanya pemisahan tugas sudah terlaksana memadai sesuai yang diharapkan					
15	Kegiatan pengendalian dengan perencanaan dan penggunaan dokumen atau catatan terlaksana memadai					
16	Kegiatan pengendalian pengamanan atas akses atau penggunaan aktiva dan catatan terlaksana memadai					
17	Aktivitas pengendalian selalu dievaluasi untuk meningkatkan kinerja					
Informasi Dan Komunikasi						
18	Organisasi menghasilkan informasi berkualitas untuk mendukung fungsi pengendalian internal.					
19	Organisasi menggunakan informasi yang relevan dalam mendukung fungsi pengendalian internal					
20	Organisasi mengkomunikasikan informasi secara tepat dalam mendukung pengendalian internal					
21	Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal secara terus menerus					
Pemantauan						
22	Pemantauan terhadap frekuensi penilaian aktivitas pengendalian internal pemerintah sesuai yang ditetapkan.					
23	Pemantauan pelaksanaan fungsi internal audit terlaksana dengan baik.					
24	Pemantauan saran dari akuntan terlaksana dengan baik					

25	Pemantauan rekonsiliasi laporan secara periodik terlaksana dengan baik.					
Pendapatan Asli Daerah						
26	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2021 mencapai target					
27	Retribusi Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2021 mencapai target					
28	Pajak Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2021 mencapai target					
29	Pengelolaan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomi, efisien, efektif, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan untuk masyarakat					

LAMPIRAN III Tabel

Tabel 4.1
Deskripsi Proses Pengumpulan Data Kuesioner Responden

Jabatan	Jumlah Kuesioner yang Diisi
Kepala Badan Pendapatan Asli Daerah	1
Sekretaris	1
Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian	5
Sub Bagian Keuangan	5
Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi	4
Bidang Pendataan dan Penetapan	1
Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan	7
Sub Bidang Penetapan	5
Sub Koordinator Verifikasi	4
Bidang Penagihan dan Pemeriksaan	1
Sub Bidang Penagihan	10
Sub Bidang Pemeriksaan	4
Sub Koordinator Pengaduan dan Keberatan	5
Bidang Perencanaan dan Pengendalian	1
Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan	4
Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian	4
Sub Koordinator Data dan Informasi	4
Total	65

Sumber : Data primer diolah, 2023

Tabel 4.27
Target dan Realisasi Rincian Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Sukabumi
(Dalam ribuan rupiah)
2019-2021

Tahun	Uraian	Target	Realisasi	%
2019	PAJAK DAERAH	251.577.000.000	267.563.178.178	106,35
	Pajak Hotel	3.300.000.000	3.959.944.966	120
	Pajak Restoran	9.100.000.000	11.037.452.858	121,29
	Pajak Hiburan	700.000.000	768.453.143	109,78
	Pajak Reklame	2.250.000.000	2.589.580.756	115,09
	Pajak Penerangan Jalan	54.500.000.000	55.778.893.657	102,35
	Pajak Parkir	270.000.000	315.619.990	116,9
	Pajak Air Tanah	82.000.000.000	84.366.911.791	102,89
	Pajak Sarang Burung Walet	7.000.000	7.000.000	100
	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	7.450.000.000	8.607.319.342	115,53
	Pajak Bumi dan Bangunan	51.000.000.000	53.445.344.795	104,79
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	41.000.000.000	46.686.656.880	113,87
	2020	PAJAK DAERAH	253.852.000.000	271.104.869.700
Pajak Hotel		1.800.000.000	2.133.061.086	118,5
Pajak Restoran		6.500.000.000	7.601.708.862	116,95
Pajak Hiburan		195.000.000	214.672.788	110,09
Pajak Reklame		2.600.000.000	2.979.547.232	114,6
Pajak Penerangan Jalan		50.000.000.000	52.191.417.782	104,38
Pajak Parkir		250.000.000	256.655.566	102,66
Pajak Air Tanah		90.000.000.000	90.712.094.910	100,79
Pajak Sarang Burung Walet		7.000.000	7.000.000	100
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan		6.500.000.000	6.763.201.604	104,05
Pajak Bumi dan Bangunan		51.000.000.000	55.966.423.425	109,74
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		45.000.000.000	52.279.086.445	116,18
2021		PAJAK DAERAH	269.732.000.000	285.482.201.266
	Pajak Hotel	2.500.000.000	3.188.528.126	127,54
	Pajak Restoran	7.500.000.000	9.492.704.183	126,57
	Pajak Hiburan	120.000.000	135.563.482	112,97
	Pajak Reklame	3.050.000.000	3.216.403.587	105,46
	Pajak Penerangan Jalan	52.000.000.000	53.671.140.330	103,21
	Pajak Parkir	225.000.000	257.209.775	114,32
	Pajak Air Tanah	85.500.000.000	86.607.722.174	101,3
	Pajak Sarang Burung Walet	7.000.000	7.000.000	100
	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	6.900.000.000	7.227.399.532	104,74

	Pajak Bumi dan Bangunan	62.000.000.000	65.494.084.170	105,64
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	49.930.000.000	56.184.445.907	112,53

Tabel 4.28
Target dan Realisasi Rincian Pendapatan Retribusi Daerah
Kabupaten Sukabumi (Dalam ribuan rupiah)
2019-2021

Tahun	Uraian	Target	Realisasi	%
2019	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	32.016.588.983	31.584.515.373	98,65
	Retribusi Jasa Umum	11.036.088.983	10.889.781.524	98,67
	Retribusi Pelayanan Pasar Hewan	13.000.000	20.974.000	161,34
	Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan	1.890.000.000	1.894.310.000	100,23
	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	15.000.000	15.019.000	100,13
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	150.000.000	92.248.000	61,5
	Retribusi Pelayanan Pasar Umum	1.000.000.000	1.105.181.000	110,52
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.800.000.000	1.713.548.250	95,2
	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	64.000.000	88.226.130	137,85
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0	0	0,00
	Retribusi Terra/Terra Ulang	100.000.000	100.509.000	100,51
	Retribusi Balai Pengobatan/ Puskesmas	5.424.088.983	5.444.131.644	100,37
	Retribusi Pemeriksaan Calon Mempelai	160.000.000	73.756.000	46,1
	Retribusi Laboratorium Patologi Klinik	250.000.000	268.340.500	107,34
	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Calon Haji	130.000.000	31.270.000	24,05
	Retribusi Pelayanan Pasar Ikan	40.000.000	42.268.000	105,67
	Retribusi Jasa Usaha	5.040.500.000	4.037.921.525	80,11
	Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)	110.000.000	115.115.000	104,65
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.940.000.000	1.882.702.100	97,05
	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	260.000.000	277.545.425	106,75
	Retribusi Terminal	1.000.000.000	834.916.000	83,49
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.485.500.000	634.903.000	42,74
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	245.000.000	292.740.000	119,49
	Retribusi Perizinan Tertentu	15.940.000.000	16.656.812.324	104,5
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/IMB Dinas	11.635.000.000	12.967.282.224	111,45
	Retribusi Izin Trayek	105.000.000	115.914.000	110,39
	Retribusi Izin Usaha Perikanan/SPI	0	0	0,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	4.200.000.000	3.573.616.100	85,09	
2020	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	21.332.000.000	22.272.616.631	104,41
	Retribusi Jasa Umum	4.756.500.000	4.641.051.700	97,57

	Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan	1.984.500.000	2.000.980.000	100,83
	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	20.000.000	20.005.000	100,03
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	75.000.000	55.076.000	73,43
	Retribusi Pelayanan Pasar Umum	1.000.000.000	769.509.700	76,95
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.200.000.000	1.417.010.500	118,08
	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	85.000.000	88.802.500	104,47
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0	0	0,00
	Retribusi Terra/Terra Ulang	100.000.000	51.728.500	51,73
	Retribusi Balai Pengobatan/ Puskesmas	0	0	0,00
	Retribusi Pemeriksaan Calon Mempelai	0	0	0,00
	Retribusi Laboratorium Patologi Klinik	250.000.000	193.553.500	77,42
	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Calon Haji	0	0	0,00
	Retribusi Pelayanan Pasar Hewan	12.000.000	13.668.000	113,9
	Retribusi Pelayanan Pasar Ikan	30.000.000	30.718.000	102,39
	Retribusi Jasa Usaha	4.396.500.000	3.529.206.560	80,27
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.456.000.000	1.569.248.200	107,78
	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	550.000.000	720.781.860	131,05
	Retribusi Terminal	400.000.000	337.351.000	84,34
	Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)	95.000.000	109.618.000	115,39
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.465.500.000	355.817.500	24,28
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	430.000.000	436.390.000	101,49
	Retribusi Perizinan Tertentu	12.179.000.000	14.102.358.371	115,79
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/IMB Dinas	8.616.000.000	9.553.684.715	110,88
	Retribusi Izin Trayek	163.000.000	86.800.000	53,25
	Retribusi Izin Usaha Perikanan/SPI	0	0	0,00
	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	3.400.000.000	4.461.873.656	131,23
2021	RETRIBUSI DAERAH	19.593.435.000	16.182.957.674	82,59
	Retribusi Jasa Umum	4.338.500.000	4.677.238.050	107,81
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan	0	0	0,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan	0	0	0,00
	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat – Alat	65.000.000	66.679.300	102,58
	Retribusi Pelayanan Persampahan/	1.984.500.000	2.080.005.000	104,81
	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian	15.000.000	15.960.000	106,4

dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat			
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	40.000.000	25.936.000	64,84
Retribusi Kios	939.000.000	984.132.000	104,81
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.210.000.000	1.408.223.250	116,38
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	85.000.000	96.302.500	113,3
Retribusi Jasa Usaha	2.956.935.000	2.768.839.325	93,64
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	487.885.000	812.300.480	166,49
Retribusi Pemakaian Laboratorium	297.000.000	308.104.800	103,74
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	500.000.000	500.166.000	100,03
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	150.000.000	156.896.045	104,6
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	400.000.000	202.997.000	50,75
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	77.050.000	66.815.000	86,72
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	860.000.000	536.100.000	62,34
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	185.000.000	185.460.000	100,25
Retribusi Perizinan Tertentu	12.298.000.000	8.736.880.299	71,04
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	9.435.000.000	6.334.174.759	67,13
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	163.000.000	79.778.000	48,94
Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	0	0	0,00
Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	2.700.000.000	2.322.927.540	86,03

LAMPIRAN IV Dokumentasi

